

BAB II

SYIAH DAN SUNNI

A. SYIAH

1. Latar Belakang Lahirnya Syiah

Masalah khalifah sesudah Rasul wafat, merupakan fokus perselisihan diantara tiga golongan besar, yaitu: Golongan Ansar, Muhajirin, dan Bani Hasyim. Selain itu, sebenarnya masih ada kelompok terselubung yang cukup potensial dalam mewujudkan ambisinya sebagai penguasaan tunggal, ialah golongan Bani Umayyah. Sikap golongan terakhir ini, tercermin pada sikap tokoh utamanya yaitu Abu Sufyan yang enggan membai'at Khalifah Abu Bakr, sekembalinya dari Saqifah menuju masjid Nabawi bersama-sama dengan ummat Islam lain, sebagai yang dilakukan oleh kaum Bani Hasyim.¹

Prakarsa pemilihan khalifah di Saqifah yang dimotori oleh Sa'ad ibn 'Ubbadah adalah benar-benar menggugah kembali bangkitnya semangat fanatisme golongan dan permusuhan antar suku yang pernah terjadi sebelum Islam. Kiranya dapat dipahami bahwa pemilihan khalifah tersebut, tanpa keikutsertaan 'Ali sebagai wakil Bani Hasyim, tampaknya membawa kekecewaan mereka yang menginginkan hak legitimasi kekhilafahan di tangan 'Ali, yang saat itu sedang mengurus jenazah Nabi. Mereka beralasan bahwa 'Ali adalah lebih berhak dan lebih utama menggantikannya, karena dia adalah menantunya, dan selain itu ia juga seorang yang mula-mula masuk Islam sesudah Khadijah, istri Rasulullah. Selanjutnya tak seorang pun yang mengingkari perjuangan, keutamaan, dan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Di antara mereka yang berpendapat demikian adalah salah seorang dari golongan Ansar yaitu Munzir ibn Arqam, ia menyatakan dalam suatu pertemuan di Saqifah: "... Kami tidak menolak keutamaan orang-orang yang kalian sebutkan (Abu Bakr, Umar, dan Ali), sebenarnya ada di antara mereka itu, seorang yang seandainya ia menuntut (kekhilafahan), tak seorang pun yang akan menentangnya ('Ali ibn Abi Talib).²

¹Shiddiqi Nouruzzaman, *Syiah dan Khawarij dalam Perspektif Sejarah* (Yogyakarta: Bidang Penerbit Pusat Latihan Penelitian Pengembangan Masyarakat, 1985), h. 23.

²Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), h. 432.

Peristiwa pembaiatan Abu Bakr pada tahun 12 H (634 M), tanpa sepengetahuan 'Ali, tampaknya melahirkan berbagai pendapat yang kontroversial tentang siapa diantara tokoh-tokoh sahabat itu yang lebih berhak menduduki jabatan khalifah. Selain itu, juga merupakan awal terbentuknya pemikiran golongan ketiga yakni Bani Hasyim, di samping golongan Muhajirin dan Ansar. Oleh karenanya tidak mengherankan jika saat itu ada orang yang ingin membai'at 'Ali ibn Abi Talib. Keinginan tersebut secara tegas ditolak 'Ali dan sebagai akibatnya, para pendukung 'Ali menunda-nunda pembaiatan mereka pada Khalifah Abu Bakr.³

Memang benar, bahwa sesudah 'Ali membaiat Khalifah pertama ini, isu politik tentang hak legitimasi Ahlul-Bait, sebagai pewaris kekhilafahan sesudah Nabi, berangsur-angsur mereda sampai berakhirnya masa pemerintahan Khalifah Umar ibn Khattab. Peredaan isu politik ini, mungkin sekali disebabkan oleh keberhasilan kedua khalifah tersebut dalam mempersatukan potensi ummat Islam untuk menghadapi musuh-musuh baru yang bermunculan saat itu.

Munculnya Bani Umayyah dalam pemerintahan 'Usman, sebagai kekuatan politik baru, telah mengundang reaksi keras ummat Islam, terhadap kebijaksanaan Khalifah, terutama sesudah enam tahun yang terakhir pemerintahannya. Kelemahan khalifah ketiga ini terletak pada ketidakmampuannya membendung ambisi kaum kerabatnya yang dikenal sebagai kaum aristokrat Mekkah yang selama 20 tahun memusuhi Nabi. Sebagai akibatnya, isu politik tentang hak legitimasi Ahlul-Bait memanas kembali.⁴

Sebagaimana diketahui dalam sejarah, tindakan politik Khalifah yang memberhentikan para gubernur yang diangkat oleh Khalifah 'Umar, dan mengangkat gubernur-gubernur baru dari keluarga 'Usman sendiri, rupanya membawa kekecewaan dan keresahan ummat secara luas. Seperti: Pengangkatan Marwan ibn Hisyam sebagai sekretaris Khalifah, Mu'awiyah sebagai Gubernur Syria, 'Abdullah ibn Sa'ad ibn Surrah sebagai wali di Mesir, dan ia masih saudara seibu dengan Khalifah, dan Walid sebagai Gubernur Kufah. Mereka dikenal sebagai penguasa yang lebih berorientasi pada kepentingan pribadi dan kelompoknya, daripada berorientasi pada kepentingan dan

³*Ibid*

⁴Ahmad Amin, *Dhuha Islam*, Juz 3, (Beirut: Dar Kutub Ilmiyyah, 1971), h. 173.

aspirasi rakyat. Sikap politik seperti ini tampaknya merupakan faktor penyebab timbulnya protes-protes sosial yang keras yang sangat kurang menguntungkan pada pemerintahannya sendiri.⁵

Setelah 'Usman wafat, 'Ali adalah calon utama untuk menduduki jabatan khalifah. Pembaiatan khalifah kali ini, segera mendapat tantangan dari dua orang tokoh sahabat yang berambisi menduduki jabatan penting tersebut. Kedua tokoh itu adalah Talhah dan Zubair yang mendapat dukungan dari Aisyah, untuk mengadakan aksi militer yang dikenal dengan perang Jamal. Akhirnya kedua tokoh tersebut terbunuh, sedangkan 'Aisyah, oleh Khalifah 'Ali dikembalikan ke Madinah.⁶

Aksi militer tersebut, tampaknya sebagai akibat kegagalan kedua tokoh itu dalam memenuhi ambisinya. Di samping itu, keduanya merasa dipaksa oleh sekelompok orang dari Kufah dan Basrah untuk membaiat 'Ali, di bawah ancaman pedang terhunus. Alasan terakhir ini rupanya dijadikan alasan baru untuk menuntut Khalifah, mereka berjanji akan taat dan patuh, jika Khalifah menghukum semua orang yang terlibat dalam peristiwa pembunuhan Usman ibn 'Affan. Tuntutan tersebut senada dengan tuntutan Mu'awiyah, yaitu agar Khalifah 'Ali mengadili Muhammad ibn Abu Bakr, anak angkatnya, yang mereka pandang sebagai biang keladi peristiwa terbunuhnya 'Usman. Dengan demikian, Khalifah 'Ali dihadapkan pada posisi yang cukup sulit di awal pemerintahannya.⁷

Tampaknya tuntutan Talhah dan Zubair tersebut, dipolitisasikan oleh Muawiyah untuk memojokkan 'Ali, yang dipandang sebagai saingan utamanya. Untuk membangkitkan semangat antipati dan permusuhan terhadap Khalifah 'Ali, Mu'awiyah menggantungkan baju 'Usman yang berlumuran darah beserta potongan jari istrinya, yang dibawa lari dari Madinah ke Syria oleh Nu'man ibn Basyar. Posisi 'Ali yang sulit ini, ditambah lagi dengan tindakan pemecatannya terhadap Gubernur Damaskus, Mu'awiyah ibn Abi Sufyan, adalah sebagai faktor yang mempercepat berkobanya perang Siffin. Perang ini mengakibatkan munculnya golongan Khawarij, musuh 'Ali yang paling ekstrem, sesudah terjadinya upaya perdamaian dari pihak Mu'awiyah dengan ber-*tahkim* pada al-Quran, setelah pasukannya terdesak oleh pasukan 'Ali di bawah

⁵*Ibid*

⁶ Mahmoud M Ayoub, *The Crisis of Muslim History: Akar-akar Krisis Politik dalam Sejarah Muslim*, terj. Munir A. Mu'in (Bandung: Mizan, 2004), h. 21-22.

⁷*Ibid*

panglima Malik al-Astar. Siasat licik Mu'awiyah yang dimotori oleh 'Amr ibn 'Ash ini, sebenarnya telah diketahui oleh Ali. Sayang sekali usaha menghadapi siasat licik ini terhalang oleh sebagian besar pasukannya sendiri yang memaksanya menerima tawaran damai tersebut. Akhirnya, kedua belah pihak sepakat untuk berdamai, dan masing-masing harus diwakili oleh seorang juru runding. Pihak Mu'awiyah diwakili oleh 'Amr ibn 'Ash, sedangkan pihak 'Ali diwakili Abu Musa al-Asy'ari.⁸

Kekalahan diplomasi pihak 'Ali di Daumatul-Jandal, sebagaimana dalam penuturan sejarah, adalah disebabkan oleh sikap Abu Musa yang amat sederhana dan mudah percaya kepada siasat 'Amr. Bahkan menurut pendapat Syed Amir 'Ali, Abu Musa ini secara diam-diam memusuhi 'Ali. 'Amr ibn 'Ash tampaknya dengan mudah meyakinkan Abu Musa, bahwa untuk kejayaan ummat Islam, 'Ali dan Mu'awiyah harus disingkirkan. Dengan perangkap 'Amr ini Abu Musa sebagai wakil yang lebih tua, dipersilakan naik mimbar lebih dahulu guna mengumumkan hasil perundingan mereka, dan secara sungguh-sungguh Abu Musa menyatakan pemecatan 'Ali sedangkan 'Amr yang naik mimbar kemudian, menyatakan kegembiraannya atas pemecatan 'Ali tersebut, kemudian ia mengangkat Mu'awiyah sebagai penggantinya. Sekalipun pihak 'Ali kalah total, namun 'Ali tetap memegang jabatan khalifah sampai ia terbunuh di mesjid Kufah, oleh seorang Khawarij bernama Ibn Muljam, tahun 41 H/661 M.⁹

Pembelotan kaum Khawarij yang disebabkan oleh peristiwa tahkim atau arbitrase antara 'Ali dengan Mu'awiyah, semakin mempersulit dan memperlemah posisi Khalifah 'Ali terutama sekali sesudah penumpasan pasukan 'Ali terhadap kaum separatistis ini di Nahrawan. Perang di Nahrawan, menyebabkan dendam mereka semakin memuncak terhadap Khalifah. Dalam hubungan ini, Donaldson menjelaskan bahwa kaum Khawarij membentuk pasukan berani mati yang terdiri: 'Abdur-Rahman ibn Muljam untuk membunuh 'Ali, Hajjaj ibn 'Abdullah as-Sarimi untuk membunuh Mu'awiyah, dan Zadawaih untuk membunuh 'Amr ibn 'As. Akan tetapi, dua petugas yang disebut belakangan ini gagal mencapai maksudnya. Dengan demikian, posisi Mu'awiyah semakin kuat.¹⁰

⁸"Pendahuluan" dalam Henry Corbin, *Imajinasi Kreatif Sufisme Ibn Arabi*, terj. M. Khozim dan Suhadi (Yogyakarta: LKiS, 2002), h. 26.

⁹Dwight, M. Donaldson, *'Aqidah as-Syiah*, terj. dalam Bahasa Arab, (Mesir: Maktabah as-Sa'adah, tt.), h. 34.

¹⁰*Ibid*, h. 35.

Dalam menghadapi dilema politik 'Ali lebih tampak sebagai seorang panglima perang daripada sebagai seorang politikus. Ia lebih suka menempuh jalan kekerasan, sekalipun harus banyak memakan korban, sedangkan dengan jalan diplomasi yang pernah ditempuhnya, ia tampak lebih banyak didikte oleh pihak lawan. Tipe perjuangan 'Ali ini rupanya dikembangkan oleh sekte Syi'ah Zaidiyah.

Para pendukung dan pengikut setia Khalifah 'Ali apabila dilihat dari aspek akidah mereka, tidak jauh berbeda dengan akidah ummat Islam pada umumnya saat itu. Sudah barang tentu, mereka belum mengenal sama sekali apalagi memiliki doktrin-doktrin seperti yang dimiliki oleh kaum Syi'ah sebagaimana yang kita kenal dalam sejarah, selain pendirian mereka bahwa 'Ali lebih utama memangku jabatan Khalifah sesudah Nabi. Jumlah mereka relatif lebih kecil. Dengan demikian, pengikut setia 'Ali dalam mencapai cita-cita perjuangannya saat itu belum berorientasi pada suatu doktrin tertentu, maka saat itu dapat dikatakan bahwa Syi'ah belum lahir. Ini berbeda dengan aliran Khawarij, semboyan: "Tiada hukum yang wajib dipatuhi selain hukum Allah," sejak keberadaan sekte ini, telah dijadikan sebagai doktrin dan pengikutnya selalu berorientasi pada ajaran itu. Oleh karenanya dipertanyakan, kapan lahirnya Syi'ah itu?¹¹

Mengenai lahirnya Syi'ah, terdapat beberapa pendapat yang kontroversial. Pendapat al-Jawad yang dikutip oleh Abu Bakar Atjeh dalam bukunya *Perbandingan Mazhab Syi'ah*, menjelaskan bahwa lahirnya Syi'ah adalah bersamaan dengan lahirnya nas (hadis) mengenai pengangkatan 'Ali ibn Abi Talib oleh Nabi Saw. sebagai khalifah sesudahnya nas yang dimaksud antara lain, mengenai kisah perjamuan makan dan minum yang diselenggarakan oleh Nabi Saw. di rumah pamannya, Abu Talib, yang dihadiri oleh 40 orang sanak keluarganya.¹² Dalam perjamuan itu beliau menyatakan: "...Inilah dia ('Ali) saudaraku, penerima wasiatku dan khalifahku untuk kalian, oleh karena itu, dengar dan taati (perintahnya) ...".

Pernyataan ini disampaikan oleh Nabi sesudah 'Ali ra. menerima tawaran sebagai khalifahnyanya. Nas seperti ini, jelas tidak terdapat dalam kitab Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim, karena itu golongan Sunni menolak nas tersebut bila dijadikan dalil untuk mengklaim kekhilafahan bagi 'Ali sebagaimana yang dikehendaki oleh kaum Syi'ah. Sebaliknya, tidak dimuatnya nas-nas semacam itu,

¹¹*Ibid.*, h. 36.

¹²Abu Bakar Atjeh, *Perbandingan Mazhab Syiah* (Solo: Ramadhani, 1988), h. 32.

demikian Syarafuddin al-Musawi, oleh kedua imam hadis tersebut dalam kitab sahihnya merupakan manipulasi golongan Sunni terhadap hadis-hadis sahih yang berkaitan dengan kekhilafahan 'Ali, karena nas itu dikhawatirkan akan menjadi senjata kaum Syi'ah untuk menyerang paham mereka.¹³

Abu Zahrah berpendapat bahwa Syi'ah tumbuh di Mesir masa pemerintahan 'Usman, karena negeri ini merupakan tanah subur untuk berkembangnya paham tersebut, kemudian menyebar ke Irak dan di sinilah mereka menetap.¹⁴ Selain itu, adalah wajar apabila ada yang berpendapat, bahwa lahirnya Syi'ah itu sewaktu Nabi sakit keras, pamannya, 'Abbas, menyarankan kepada 'Ali dan mengajaknya menghadap Nabi saw. untuk meminta wasiatnya, siapakah orang yang akan menggantikan kepemimpinan beliau, namun maksud tersebut ditolak 'Ali ra. dengan tegas, dan ia pun bersumpah tidak akan memintanya.¹⁵

Selanjutnya masih ada pendapat yang mengatakan bahwa lahirnya Syi'ah itu bersamaan dengan terjadinya perang Jamal, perang Siffin, dan perang di Nahrawan, karena pada saat itu, seorang tidak dapat dikatakan sebagai Syi'ah kecuali orang yang mengunggulkan kekhilafahan 'Ali daripada 'Usman ibn 'Affan, sebagai yang telah disinggung di atas.

Apabila dilihat ciri-ciri dari beberapa pendapat di atas, maka pendapat pertama tampak sama sekali tidak realistis, sedangkan tiga pendapat yang terakhir, rupanya lebih menitikberatkan pada adanya sikap dan tindakan-tindakan nyata sebagai pendukung dan pengikut setia 'Ali semasa hidupnya. Akan tetapi, apabila kelahiran Syi'ah dilihat sebagai suatu aliran keagamaan yang bersifat politis secara utuh, maka ia harus dilihat pula dari aspek ajaran atau doktrin politiknya, yaitu tentang hak legitimasi kekhilafahan pada keturunan 'Ali dengan Fatimah, puteri Rasulullah, sebab dari segi doktrin inilah identitas Syi'ah tampak lebih jelas, berbeda dengan identitas sekte-sekte Islam lainnya. Dan munculnya doktrin Syi'ah seperti ini adalah bermula sejak timbulnya tuntutan penduduk Kufah – pendukung 'Ali – agar masalah kekhilafahan dikembalikan kepada keluarga

¹³Syarafuddin al-Musawi, *Dialog Sunnah dan Syi'ah*, terj. Muhammad al-Baqir (Bandung: Mizan, 1983), h. 140.

¹⁴Muhammad Abu Zahrah, *Tarikhul Mazahibul Islamiyyah*, vol. I, (Beirut: Dar Fikr, tt), h. 36.

¹⁵Ahmad Amin, *Fajrul Islam* (Singapura: Sulaiman al-Mar'i, 1965), h. 266-7.

Khalifah atau Ahlul-Bait dari tangan orang-orang yang dianggap telah merampasnya.

Dari penerapan doktrin ini, penulis berpendapat bahwa lahirnya Syi'ah itu bersamaan waktunya dengan pengangkatan Hasan ibn 'Ali ibn Abi Talib sebagai imam kaum Syi'ah. Adapun aktivitas para pendukung dan pengikut setia 'Ali pada periode sebelumnya, hanyalah merupakan faktor yang mempercepat proses tumbuhnya benih-benih Syi'ah yang sudah siap tumbuh dan berkembang.¹⁶

2. Sekte-sekte dan Doktrin dalam Teologi Syiah

Dalam kajian ini, penulis lebih menitikberatkan pada bahasan yang berkaitan dengan perkembangan sekte-sekte Syi'ah secara garis besar, serta hubungannya dengan paham Mahdiyyah.

Pada masa Hasan ibn 'Ali, posisi kaum Syiah semakin goyah karena derasnya fitnah, perselisihan, dan perpecahan di kalangan mereka, yang sengaja ditanamkan oleh golongan Saba'iyyah, pengikut Ibn Saba'. Lemahnya daya juang dan kurang wibawanya Hasan adalah menjadi faktor yang mempersulit posisi golongan Syi'ah. Usaha Hasan dalam memerangi golongan Saba'iyyah, terutama sesudah kegagalannya menumpas gerakan Mu'awiyah, sungguh hasilnya sangat mengecewakan. Pada saat itulah Hasan mulai ditinggalkan oleh kaumnya, demikian Ihsan Ilahi Zahir, sehingga sebagian pengikutnya bergabung dengan golongan Saba'iyyah, sebagian lagi berpaling pada Mu'awiyah, dan golongan Khawarij. Oleh karena itu, Hasan pun kemudian memilih jalan damai dengan pihak Mu'awiyah. Selanjutnya ia mundur dari jabatan khalifah secara formal pada tahun 41 H/661 M, dengan demikian secara de jure, ia menjabat selama sepuluh tahun, akan tetapi secara defacto, ia berkuasa hanya enam bulan tiga hari.¹⁷

Sesudah Hasan wafat, diangkatlah saudaranya, Husain ibn 'Ali sebagai Imam. Putera 'Ali kedua ini tampak memiliki semangat dan daya juang sebagai yang dimiliki bapaknya, namun sayang, ia harus tewas di ujung pedang tentara Yazid di padang Karbela secara memilukan, pada tanggal 1 Oktober 680 M.¹⁸

Kematian Husain ini merupakan bencana bagi kaum Syi'ah, sehingga makamnya dipandang sebagai tempat yang keramat serta memiliki keistimewaan dan

¹⁶*Ibid*.

¹⁷Dewan Redaksi, *Ensiklopedi*, h. 456-457.

¹⁸*Ibid*, h. 458.

keluarbiasaan, lantaran kecintaan mereka terhadap Husain, dan oleh karena itu, mereka mentradisikan ziarah umum ke makamnya setiap bulan Muharam.¹⁹

Kematian Husain tersebut bermula dari banyaknya surat penduduk Kufah yang menyatakan janji setianya kepada putera 'Ali ini. Aksi militer yang dilancarkan Husain, lantaran dia lebih mempercayai janji orang Kufah daripada ia mempertimbangkan saran-saran para penasihatnya yang cukup berpengalaman dan mengetahui benar tabiat orang Kufah yang telah mengkhianati keluarganya. Dan karenanya, kematian Husain sebagai syahid, menimbulkan unsur baru dalam moral agama di kalangan Syi'ah Kufah. Yaitu mereka merasa sangat berdosa atas kematian Husain dan mereka berkeinginan untuk menebus dosa mereka dengan mengangkat senjata menuntut bela atas kematiannya pada penguasa Umayyah. Golongan tersebut menamakan dirinya at-Tawwabun (orang-orang bertobat).²⁰

Golongan terakhir ini berkeyakinan bahwa mati berperang karena membela kepentingan Ahlul-Bait adalah mati syahid. Disinilah mereka mengidentikkan loyalitasnya terhadap 'Ali dan keturunannya, sama dengan loyalitasnya terhadap Nabi atau agama.

Ketidakpuasan kaum mawali dari Persia terhadap penguasa Umayyah, mendorong mereka dan memberi arah yang sama sekali baru, kepada kegiatan-kegiatan sosio-politik kaum Syi'ah, demikian Fazlur Rahman, sehingga pimpinan Syi'ah, mungkin sekali ia orang Arab, tetapi para pengikutnya beralih dari bangsa Arab ke bangsa Persia. Sejak itulah kaum Syi'ah mengalami perubahan besar dan mulai mengarahkan gerakannya, dari gerakan politik semata kepada gerakan keagamaan yang bercorak kemazhaban. Selanjutnya Ihsan Ilahi Zahir menjelaskan bahwa sesudah Syi'ah terikat oleh unsur-unsur asing yang melindas, maka Syi'ah terlepas dari kebiasaan bangsa Arab yang terdidik secara Islami, dan sekalipun mereka kaum Syi'ah masih berada dalam lingkaran Islam, namun bukan-Islam yang ortodoks, akan tetapi, Islam dalam bentuknya yang baru.²¹

Pada saat yang sama, Syi'ah mulai membawa pikiran-pikiran asing secara terselubung, aliran ini juga merupakan wadah dari berbagai aspirasi, dan tempat

¹⁹*Ibid*.

²⁰*Ibid*, h. 459.

²¹Ihsan Ilahi Zahir, *As-Syi'ah wat-Tasyayyu'* (Lahore Pakistan: Iradah Tarjuman as-Sunnah, 1984), h. 23.

berlindungnya musuh-musuh Islam yang ingin merusak dari dalam sehingga ia mudah terpecah belah menjadi sub-sub sekte yang banyak sekali.

Di antara kelompok-kelompok yang memasukkan ajaran-ajaran nenek moyang mereka kedalam ajaran Syi'ah ialah golongan Yahudi, Nasrani, Zoroaster, dan Hindu. Mereka itu berkeinginan melepaskan negerinya dari kekuasaan Islam dengan menyembunyikan niat jahat mereka dan menunjukkan sikap berpura-pura mencintai Ahlul-Bait sebagai kedok.

Seperti ajaran Syi'ah tentang 'Aqidah ar-Raj'ah, ucapan sementara golongan ini bahwa api neraka tidak akan membakar mereka kecuali sedikit saja. Demikian pula diantara mereka ada yang mengatakan bahwa hubungan al-Masih dengan Tuhan, sifat ketuhanan yang menyatu dengan sifat kemanusiaan seperti pada diri seorang imam, juga ada yang mengatakan bahwa kenabian atau kerasulan itu tidak akan terhenti untuk selamanya. Selanjutnya ada pula diantara mereka yang menjisimkan Tuhan, berbicara tentang Tanasukh atau Reinkarnasi dan Hulul dan lain sebagainya.²²

Tampaknya figur Husain, bagi kaum Syi'ah mempunyai keistimewaan tersendiri; terutama bagi Syi'ah Persia. Hal itu mungkin sekali karena Husain adalah cucu rasul di satu pihak, sedangkan istrinya Syahr Banu puteri Yazdajird III, mantan raja Persia di pihak lain. Sebelum Islam, di Persia telah berkembang suatu tradisi yang bertolak dan pandangan tentang "Hak Ketuhanan" atau Divine right yang berarti bahwa dalam diri raja Persia telah mengalir darah ketuhanan. Dengan demikian, raja memiliki kebenaran tindakan yang harus dipatuhi oleh rakyat. Raja ibarat pengayoman Allah di bumi untuk menegakkan kemaslahatan hamba-hamba-Nya.

Pandangan seperti ini, demikian Ahmad Syalabi, masih tetap ada sesudah orang Persia itu memeluk Islam, sehingga karenanya mereka memandang Ahlul-Bait sebagai orang yang berhak memerintah dan harus ditaati oleh manusia. Rupanya pandangan seperti inilah yang membentuk konsep pola keimaman dalam Syi'ah.²³

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor sosio-religio-kultural yang membentuk Syi'ah seperti sekarang ini adalah akibat penetrasi budaya dan kepercayaan non-Islam yang pernah berakar pada suatu masyarakat di suatu negeri,

²²Muhammad Al-Bahi, *Al-Janibul-Ilahi min Tafkiril-Islami*, Juz II, (Qahirah: Dar Ihya'il-Kutubil-'Arabiyyah Isa al-Babi al-Halabi, 1948), h. 34.

²³Ahmad Syalabi, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), h. 13-14.

dan pernah memiliki peradaban yang lebih maju daripada bangsa penaklukknya. Biasanya kaum Syi'ah membentuk pola kehidupan keagamaan yang berbeda dan bahkan sering bertentangan serta menghilangkan corak keagamaan aslinya. Kepercayaan hasil perpaduan antara dua tradisi keagamaan yang berbeda, yaitu Islam dan non-Islam, yang melahirkan praktek keagamaan baru dalam Islam merupakan bid'ah yang sangat dicela oleh Nabi, sebagaimana sabdanya:

"... Maka sesungguhnya sebaik-baik ajaran adalah kitab Allah (al-Quran) dan petunjuk yang terbaik adalah petunjuk Muhammad saw., dan perkara yang terjahat ialah perkara baru yang dicipta dalam agama (bid'ah). Dan setiap bid'ah adalah sesat." (Hadis riwayat Muslim).

Sebagaimana diketahui dalam sejarah, agama Nasrani setelah memasuki kerajaan Romawi, juga mengalami distorsi yang jauh lebih mengarah pada perombakan terhadap ajaran Nabi Isa a.s. Munculnya ajaran Paulus sebagai perpaduan antara ajaran Nasrani dengan kepercayaan dan kebudayaan Romawi, berakibat munculnya praktik-praktik keagamaan baru yang diikuti oleh lahirnya berbagai sekte keagamaan. Demikian pula dengan sekte-sekte Syi'ah yang muncul sesudah Husain wafat.²⁴

Adapun munculnya sekte-sekte Syi'ah, bermula dari masalah imamah atau kepemimpinan. Yaitu siapakah yang berhak menjadi imam sesudah terbunuhnya Husain, oleh karena pada saat itu belum ada diantara putera-puteranya yang mencapai usia dewasa. Rupanya kaum Syi'ah sulit menghindari perpecahan, karena timbulnya tiga kelompok yang berbeda paham.

Golongan pertama, memandang bahwa keimaman harus berada di tangan keturunan Husain dan tidak boleh lepas dari mereka, dan keimaman harus melalui nas dari imam baik yang dikenal maupun yang tersembunyi, golongan ini terpaksa mengangkat putera Husain yang belum dewasa sebagai imam. Golongan ini kemudian disebut golongan Imamiyyah.

Adapun golongan kedua, berpendapat bahwa mengangkat imam yang belum dewasa adalah tidak sah. Mereka tidak yakin bahwa Husain telah menjanjikan keimaman itu kepada salah seorang puteranya untuk dibai'at. Oleh karena itu, mereka bersikap menunggu-nunggu sampai munculnya seorang putera keturunan Husain atau

²⁴Syed Amir 'Ali, *Api Islam*. Terj. HB. Jasin, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h. 43.

Hasan yang memiliki ilmu pengetahuan, kezuhudan, keberanian, kesalehan, keadilan, dan berani mengangkat senjata terhadap penguasa yang zalim. Oleh karenanya golongan ini disebut dengan al-Waqifah. Mereka menghentikan aktivitasnya selama 60 tahun sejak terbunuhnya Husain sampai bangkitnya Zaid ibn 'Ali ibn Husain di Kufah yang memberontak kepada Hisham ibn 'Abd al-Malik dari dinasti Umayyah. Kemudian golongan ini dikenal dengan nama Syi'ah Zaidiyyah.²⁵

Golongan ketiga berpendapat bahwa jabatan imam sesudah Husain, jatuh pada Muhammad ibn al-Hanafiyyah yaitu saudara seayah dengan Husain, sekalipun dia bukan dari garis Nabi. Golongan ketiga ini beralasan, demikian al-Mahdi Lidinillah Ahmad, bahwa 'Ali ibn Abi Talib meminta kehadiran Muhammad, saat menjelang wafat dan saat berwasiat kepada putera-puteranya. 'Ali meminta kepada Muhammad agar mentaati Hasan dan Husain, dan sebaliknya agar keduanya berbuat baik dan menghormati Muhammad ibn al-Hanafiyyah. Oleh karena itu, kelompok ini memandang kehadiran Muhammad bersama kedua saudaranya menerima wasiat 'Ali tersebut, menunjukkan bahwa dia juga memperoleh hak untuk diangkat sebagai imam. Golongan ketiga ini dikenal dengan nama Syi'ah Kaisaniyyah. Pendirinya adalah Kaisan bekas budak 'Ali, ada pula yang mengatakan bahwa dia adalah Mukhtar ibn Abi 'Ubaid, sehingga golongan ini disebut pula dengan nama Mukhtariyyah.

Perpecahan Syi'ah tersebut, berakibat langsung terhadap lahirnya sekte-sekte baru dengan corak pemikiran yang berbeda-beda. Jika golongan Imamiyyah dalam masalah keimaman lebih menitikberatkan pada keturunan Husain, maka golongan al-Waqifah yang kemudian dikenal dengan Syi'ah Zaidiyyah, lebih memfokuskan perhatiannya pada persyaratan-persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang imam. Mereka tidak peduli, apakah dia keturunan Hasan atau keturunan Husain asalkan dia masih berada di jalur keturunan Nabi. Akan tetapi, bagi golongan Kaisaniyyah tidak memandang penting jalur keturunan itu dari Nabi, namun yang terpenting adalah jalur keturunan 'Ali ibn Abi Talib.²⁶

a. Syiah Kaisaniyyah

²⁵ al-Mahdi Lidinillah Ahmad, *Kitabul-Munyah wal-'Amal fi Syarhil-Milal wan-Nihal* (Beirut: Darul-Fikr, 1979), h. 56-57.

²⁶ *Ibid.*

Dilihat dari eksistensi dan gerakannya, golongan ini dapat dikatakan sebagai sekte Syi'ah yang tertua. Mereka mengadakan aksi militer terhadap penguasa Bani Umayyah, dengan dalih membela hak-hak kaum tertindas. Ide ini tampaknya didukung oleh kaum Mawali Irak dan Persia, yang diperlakukan oleh pemerintah Umayyah sebagai masyarakat kelas dua. Sebagai akibatnya penduduk kedua kota tersebut tidak simpati lagi pada Bani Umayyah.²⁷

Sekte ini mengangkat Muhammad ibn Hanafiyyah sebagai imam, sedangkan ajarannya bersumber pada ajaran Ibn Saba' dan golongan Saba'iyyah, seperti ajaran tentang: al-Gaibah, 'Aqidah ar-Raj'ah (keyakinan akan kembalinya seorang imam yang telah wafat), dan Tanasukh. Al-Syahrastani menyatakan, bahwa sesudah Muhammad ibn al-Hanafiyyah yang dikenal sebagai orang yang berpengetahuan luas dan berpikiran cemerlang mengerti bahwa sekte ini mengajarkan ajaran bohong dan sesat, ia pun segera berlepas tangan dari kesesatan dan kebid'ahan mereka, serta pengkultusan-pengkultusan pengikut aliran ini terhadap dirinya.²⁸ Mereka beranggapan bahwa dia memiliki berbagai keluarbiasaan atau al-Makharigul-Mumawwahah yakni keluarbiasaan yang mereka buat-buat untuk Muhammad ibn al-Hanafiyyah.

Sesudah ia wafat, jabatan imam beralih kepada puteranya, Abu Hasyim, kemudian lahir subsekte baru yang dikenal dengan al-Hasyimiyyah. Setelah Abu Hasyim wafat timbul masalah siapa pemegang jabatan imam sesudahnya. Jabatan ini tampaknya menjadi rebutan diantara kelompok-kelompok yang berambisi, sehingga timbul pendapat yang kontroversial.

Dalam hubungan ini asy-Syahrastani menjelaskan bahwa kelompok yang berselisih itu ada yang mengatakan, sebenarnya Abu Hasyim telah mewasiatkan keimanan itu kepada Muhammad ibn 'Ali ibn 'Abdullah ibn 'Abbas, saat ia hendak wafat dalam perjalanan pulang dari Syria. Selanjutnya penerima wasiat ini terus mewasiatkan keimanan ini kepada anak keturunannya, sehingga jadilah kekhilafahan itu jatuh ke tangan Bani 'Abbas. Kelompok lain mengatakan bahwa jabatan imam itu jatuh pada kemenakan Abu Hasyim, Hasan ibn 'Ali ibn Muhammad al-Hanafiyyah. Akan tetapi, ada pula yang mengatakan, keimanan itu dilimpahkan kepada saudara Abu Hasyim

²⁷Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam*, h. 460.

²⁸Abdul-Fath 'Abdul-Karim Asy-Syahrastani, *Al-Milal wan-Nihal* (Beirut: Darul-Fikr, tt.), h. 43-44.

sendiri yaitu 'Ali, baru kemudian, 'Ali mewasiatkan pada puteranya, Hasan. Adapun kelompok terakhir mengatakan, bahwa keimaman itu telah lepas dari Abu Hasyim, karena ia telah mewasiatkannya kepada 'Abdullah al-Kindi, oleh karenanya menurut golongan ini, ruh Abu Hasyim telah berpindah ke dalam diri 'Abdullah al-Kindi, sehingga berkembanglah paham Reinkarnasi di kalangan pengikutnya.

b. Syiah Zaidiyyah

Sekte ini berdiri sesudah berselang 60 tahun setelah Husain wafat, di bawah pimpinan Imam Zaid ibn 'Ali. Sekte tersebut memiliki persyaratan khusus dalam memilih seorang imam yaitu seorang yang 'Alim, Zahid (sangat berhati-hati dengan masalah dunia), pemberani, pemurah, dan mau berjihad di jalan Allah guna menegakkan keimaman taat pada agama baik dia dari putera Hasan atau Husain.

Dalam masalah kekhilafahan atau keimaman, golongan ini rupanya lebih moderat. Mereka bisa menerima Imam Ma'ful yakni imam yang dinominasikan, disamping adanya Imam al-A'f'al atau imam yang lebih utama. Pikiran seperti ini, tentunya karena pendiri sekte Zaidiyyah, pernah berguru kepada Wasil ibn 'Ata, pendiri Mu'tazilah. Oleh sebab itu, aliran ini tidak menyalahkan atau membenci khalifah-khalifah sebelum 'Ali ibn Abi Talib. Pendirian tentang [kata-kata Arab] yaitu sahnya imam yang dinominasikan disamping adanya seorang imam yang lebih utama, tampaknya mendapat reaksi keras dari Syi'ah Kufah dan menolak pendirian tersebut. Itulah sebabnya mereka disebut golongan Syi'ah Rafidah.²⁹

Sebagaimana diketahui, umumnya kaum Syi'ah berprinsip bahwa 'Ali ibn Abi Talib adalah satu-satunya orang yang lebih berhak menjadi Khalifah sesudah Nabi, tetapi mereka berbeda paham tentang siapa yang berhak menjadi imam sesudah Husain wafat. Perbedaan-perbedaan paham itu rupanya menjadi faktor yang mewarnai identitas kelompok masing-masing. Sebagai contoh sekte Zaidiyyah, karena doktrinnya yang keras dalam mencapai cita-cita perjuangannya, lebih suka menempuh jalan kekerasan, sehingga pemimpinnya banyak yang mengalami nasib sama dengan nasib Husain ibn 'Ali. Zaid juga menjadi korban kecurangan penduduk Kufah karena kurang memperhatikan saran-saran dari Salman ibn Kuhail, 'Abdullah ibn Hasan, dan saran dari saudaranya sendiri Muhammad al-Baqir. Selanjutnya dijelaskan bahwa pada saat dia

²⁹Nouruzaman Shiddiqi, *Syi'ah dan Khawarij dalam Perspektif Sejarah* (Yogyakarta: Bidang Penerbit Pusat Latihan Penelitian Pengembangan Masyarakat, 1985), h. 29.

berada di ujung pedang Yusuf ibn 'Umar Gubernur Irak, Zaid pun ditinggalkan oleh orang-orang Kufah. Sesudah ia wafat pada 122 H, jabatan imam beralih kepada puteranya, Yahya, yang menyingkir ke Khurasan. Kemudian ia mengadakan pemberontakan terhadap pemerintahan Walid ibn Yazid dan mengalami nasib sama dengan nasib ayahnya. Sesudah itu keimaman dipegang oleh Muhammad ibn 'Abdullah ibn Hasan yang dikenal dengan an-Nafsuz-Zakiyyah, bersama-sama dengan Ibrahim, dan keduanya terbunuh sesudah mereka mengadakan aksi militer di Madinah. Seandainya sekte ini tidak menempuh jalan kekerasan dalam mengembangkan ide-ide doktrinalnya yaitu dengan menyebarkan karya-karya ijtihad para imam mereka, tentu keberadaan sekte ini lebih berakar dan berpengaruh dalam masyarakat.³⁰

Selanjutnya dijelaskan bahwa sesudah terbunuhnya Ibrahim di Basrah, sekte Zaidiyyah ini sudah tidak terorganisasikan lagi sampai munculnya Nasir al-Atrus yang menda'wahkan mazhab Zaidiyyah di daerah Dailam dan Jabal, dua daerah yang kemudian menjadi basis Syi'ah Zaidiyyah. Sebagaimana sekte-sekte yang lain, golongan Zaidiyyah pun mengalami perpecahan menjadi beberapa subsekte. Diantara sekte-sekte yang menyimpang jauh dari doktrin Zaidiyyah adalah al-Jarudiyyah. Pengikutnya memandang Muhammad an-Nafsuz-Zakiyyah sebagai al-Mahdi.³¹

c. Syiah Imamiyyah

Aliran ini menjadikan semua urusan agama harus berpangkal pada Imam, sebagaimana halnya kaum Sunni mengembalikan seluruh persoalan agama pada al-Quran dan Sunnah atau ajaran Nabi. Menurut paham Imamiyyah, manusia sepanjang masa tidak boleh sunyi dari imam, karena masalah keagamaan dan keduniaan selalu membutuhkan bimbingan para imam. Bahkan mereka mengatakan, tidak ada yang lebih penting dalam Islam, melainkan menentukan seorang imam. Kebangkitannya adalah untuk melenyapkan perselisihan dan menetapkan kesepakatan. Oleh karena itu, ummat ini tidak boleh mengikuti pendapatnya sendiri dan menempuh jalannya sendiri yang berbeda-beda yang mengakibatkan perpecahan.³²

Aliran ini berkeyakinan bahwa keimaman 'Ali ibn Abi Talib sesudah wafat Nabi adalah dengan nas yang jelas dan benar. Ibn Khaldun menjelaskan bahwa keimaman

³⁰Saleh A. Nahdi, *Masalah Imam Mahdi* (Surabaya: Raja Pena, 1966), h. 14-18.

³¹*Ibid*

³²*Ibid*, h. 20.

bagi mereka, tidak hanya merupakan kemaslahatan umum yang harus diserahkan kepada ummat untuk menentukannya, bahkan imam merupakan tiang agama dan tatanan Islam yang tidak mungkin dilupakan oleh Nabi untuk menentukannya. Dan ia harus seorang yang ma'sum (suci dari segala dosa) dan nas itu sendiri menurut mereka, ada yang secara tegas dan ada pula yang samar-samar.

Konsep keimaman mereka, bagi sekte Zaidiyyah, sebagaimana dijelaskan Ibn Khaldun dalam *Muqaddimah*-nya, pengangkatan seorang imam bukan ditetapkan oleh nas, tetapi dengan pemilihan oleh Ahlul-Halli wal-'Aqd yaitu semacam dewan yang diberi wewenang mengangkat dan menetapkan seorang imam. Jika Syi'ah Imamiyyah menerima kekhilafahan Abu Bakr dan Umar, maka berarti mereka harus menerima paham Sunni, dan secara tidak langsung mereka harus mengakui pula kekhilafahan Bani Umayyah yang mereka kategorikan sebagai kelompok Sunni. Oleh karena itu, kekhilafahan kedua tokoh diatas, harus mereka tolak keabsahannya. Kecintaan kaum Syi'ah terhadap 'Ali dan Ahlul-Bait yang menjurus ke arah kultus individu di satu pihak, dan kebencian mereka terhadap Bani Umayyah karena penindasannya pada Ahlul-Bait di pihak lain, bermula dari dendam permusuhan lama antara Bani Hasyim dengan Bani Umayyah sebelum Islam.³⁵

Di sisi lain, rupanya hubungan kaum Mawali Persia dengan keturunan Ali ibn Abi Talib, dengan cara menunjukkan kecintaan serta pembelaan mereka terhadap hak-hak Ahlul-Bait, tampaknya menjadi faktor penyebab retaknya keluarga Bani Hasyim. Perpecahan itu ditandai dengan lahirnya kelompok pendukung keturunan 'Ali ibn Abu Talib di satu pihak, yang dikenal dengan golongan Syi'ah, dan munculnya Bani 'Abbas di pihak lain. Jika keturunan 'Ali selalu gagal merebut kekuasaan politik pada masa pemerintahan dinasti Umayyah, maka keturunan 'Abbas, lewat Syi'ah Kaisaniyyah, berhasil merebutnya dan mendirikan dinasti 'Abbasiyyah. Sebagaimana diketahui dalam sejarah, untuk mempertahankan eksistensi dan kekuasaannya kelompok terakhir ini, memandang kelompok pertama sebagai saingan politiknya sebagaimana halnya orang-orang Umayyah, sehingga penguasa baru tersebut tidak bisa terlepas dari sikap

³⁵Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, terj. Toha Ahmadi (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2000), h. 451.

dan tindak kekerasan terhadap saudara sesukunya (Bani Hasyim) seperti yang pernah dilakukan oleh dinasti Umayyah terhadap lawan-lawan politiknya.³⁴

Sebagai yang telah disinggung diatas, perpecahan Syi'ah Imamiyyah bermula dari masalah siapa yang berhak menjadi imam sesudah Husain wafat? Menurut sekte ini karena saat itu dapat dikatakan dalam keadaan darurat, maka mereka memandang sah pengangkatan 'Ali ibn Husain yang dijuluki dengan Zainal-'Abidin, sekalipun ia belum dewasa. Imam ini selamanya tinggal di Madinah sampai wafatnya di tahun 94 H, dan ia pun tidak pernah mengadakan aksi kekerasan terhadap penguasa Bani Umayyah. Sekte ini sesudah 'Ali ibn Husain wafat, enggan mengakui Zaid ibn 'Ali sebagai Imam, tetapi mengangkat saudaranya Muhammad al-Baqir. Dalam usia 19, ia menduduki jabatan imam tersebut di akhir masa pemerintahan al-Walid, namun ia tetap tinggal di Madinah sebagaimana ayahnya. Sepeninggal al-Baqir, jabatan imam dipegang oleh puteranya, Ja'far as-Sadiq. Silsilah imam ini, dari jalur ayahnya sampai kepada Nabi; sedangkan dari jalur ibunya, Ummu Farwah, sampai kepada Abu Bakr as-Siddiq. Ketenarannya sebagai guru dan pemikir besar di zamannya, diakui oleh semua pihak yang mengenal kemasyhurannya, terutama di bidang ilmu fiqh dan hadis.³⁵

Sejumlah muridnya telah memberikan andil besar dalam memajukan Ilmu Fiqh dan Ilmu Kalam, seperti: Abu Hanifah dan Anas ibn Malik. Menurut riwayat lain juga terdapat nama-nama seperti Wasil ibn 'Ata yang dikenal sebagai tokoh dan pendiri Mu'tazilah, dan Jabir ibn Hayyan sebagai ahli kimia yang masyhur. Karena kemasyhurannya itu, beberapa tokoh Syi'ah abad modern seperti Syarafuddin al-Musawi, 'Ali Syariati dan lain sebagainya, menunjukkan klaim terhadap ummat Islam non Syi'ah supaya mereka mengakui dan menerima pikiran-pikiran hasil ijtihad Imam Ja'far as-Sadiq sebagai mazhab ke-5 dalam Islam, namun demikian, karya-karya besar Imam ini, di perguruan tinggi Timur Tengah, seperti Universitas al-Azhar di Mesir, telah dijadikan bidang studi sendiri dalam Ilmu Fiqh.

'Ulama' besar dari kalangan Ahlul-Bait ini menyatakan berlepas tangan dari segala kebohongan dan kebodohan ucapan serta tindakan kaum Syi'ah Rafidah yang dihubungkan pada dirinya, seperti ucapan mereka tentang: al-Gaibah, ar-Raj'ah, al-Bada', Tanasukh, Hulul, dan at-Tasybih atau penyerupaan Tuhan dengan manusia.

³⁴*Ibid*, h. 21.

³⁵*Ibid*, h. 22.

Penolakannya terhadap kebidahan-kebid'ahan kaum Syi'ah dinyatakan dengan tegas sebagai berikut: "Semoga Allah mengutuk mereka (kaum Syi'ah), sesungguhnya kami tidak membiarkan para pendusta yang senantiasa membuat kedustaan atas nama kami. Maka cukuplah bagi kami, Allah sebagai pengaman dari semua para pendusta. Dan semoga Allah menyangatkan panasnya siksa pada diri mereka."

Dari uraian di atas, nyatalah bahwa tokoh-tokoh Ahlul-Bait yang diangkat sebagai Imam oleh kaum Syi'ah, pada umumnya tinggal di Madinah dan mereka jauh dari para pengikutnya yang bertebaran di berbagai negeri. Tampaknya tidak seorang pun di antara para Imam itu yang menyimpang dari ajaran Islam, dan bahkan mereka tidak suka menyerang pribadi Abu Bakr atau Umar, malahan mereka menghormatinya. Oleh karena itu, sikap para Imam yang lurus dan tegas terhadap segala penyelewengan para pengikutnya, dapat diduga sebagai salah satu faktor yang menambah kejengkelan mereka dan sebagai reaksinya, kaum Syi'ah tidak segan-segan mencatut nama baik imam-imam mereka untuk menguatkan pendirian atau paham masing-masing. Tidak mustahil, jika kaum Syi'ah kemudian mendirikan sub-sub sekte yang ekstrem dengan menyerap ajaran-ajaran non-Islam dan kemudian mereka membuat cerita-cerita fiksi tentang kehebatan dan keluarbiasaan imam-imam mereka.³⁶

Perpecahan Syiah Imamiyyah sesudah Jafar as-Sadiq wafat, semakin meluas dan perpecahan ini tampaknya berpangkal, siapa di antara enam puteranya yang lebih berhak menggantikannya. Maka mulailah muncul sub-sub sekte baru seperti: An-Nawusiyyah, yang memandang Ja'far as-Sadiq sebagai al-Qa'im atau al-Mahdi demikian pula halnya dengan al-Musawiyah, pengikut Musa al-Kazim yang berkeyakinan bahwa Musa tidak mati, ia hanya gaib saja dan akan kembali lagi ke dunia, dan tidak akan ada lagi seorang imam sesudahnya. Oleh karena itu, sekte yang terakhir ini disebut juga dengan al-Qatiyyah. Dalam bahasan ini akan dibicarakan dua subsekte yang terpenting, dan keduanya mempunyai corak kemahdian yang berbeda satu sama lain.

d. Syiah Ismailiyyah

³⁶Muhammad Abu Zahrah, *Tarikhul-Mazahibul-Islamiyyah* (Beirut: Dar al-Fikril-'Arabi, tt.), h. 341.

Aliran ini dikenal pula dengan Syi'ah Sab'iyah atau Syi'ah Batiniyyah. Disebut demikian, karena pengikut sekte berkeyakinan bahwa Imam yang ketujuh bagi mereka adalah Isma'il atau karena pendirian mereka yang menyatakan bahwa setiap yang lahir, pasti ada yang batin dan setiap ayat yang turun pasti ada Ta'wil atau Tafsir Batiniyyah-nya.³⁷

Syi'ah Isma'iliyyah ini muncul sesudah tahun 200 H, menurut penuturan al-Mahdi Lidinillah Ahmad yang mengutip pernyataan al-Hakim dan kesepakatan para penulis Muslim, bahwa orang yang mula-mula membangun mazhab ini ialah anak-anak orang Majusi dan sisa-sisa pengikut aliran Huramiyyah. Mereka dihimpun oleh suatu perkumpulan yang bekerja sama dengan orang-orang yang ahli tentang Islam dan filsafat. Motif mereka tidak lain, karena mereka ingin membuat tipu daya guna merusak Islam dengan menyusupkan para propagandisnya kedalam masyarakat Syi'ah yang masih awam, karena mereka iri terhadap kejayaan Islam. Untuk pertama kalinya sekte ini lahir di Irak, kemudian ia mengalihkan gerakannya ke Persia, Khurasan, India, dan Turkistan. Di daerah-daerah tersebut, ajaran-ajarannya bercampur dengan kepercayaan versi lama dan pemikiran Hindu. Dalam hubungan ini Fazlur Rahman menjelaskan bahwa Syi'ah Isma'iliyyah ini giat berpropaganda di sekitar abad II H/IX M-V H/XI M, sehingga ia pernah menjadi aliran terkuat di dunia Islam, sejak dari Afrika sampai ke India dengan mengobarkan revolusi sosial, melalui asimilasi ide-ide dari luar terutama ide platonisme dan gnostik. Dari sinilah sekte tersebut menyusun sistem filsafat di atas mana dibangun suatu agama baru, setelah merongrong struktur keagamaan ortodoks.³⁸

Isma'il yang wafat mendahului ayahnya, diyakini keimamannya melalui nas dari ayahnya, Ja'far as-Sadiq. Pengikut sekte ini mengingkari kematiannya dan ia dipandang sebagai al-Qa'im (yang bangkit) sampai ia menguasai bumi dan menegakkan urusan manusia. Sesudah Isma'il, jabti Fatimiyyah.

Sesudah sekte ini merasa kuat posisinya, berakhirlah Imam Mastur dan muncullah 'Abdullah ibn Muhammad al-Habib yang mengaku sebagai Imam Mahdi yang dijanjikan. Di antara subatan imam diteruskan oleh anaknya, Muhammad al-Maktum dan selanjutnya jabatan tersebut diteruskan oleh puteranya, Muhammad al-Habib, kemudian oleh penggantinya, 'Abdullah al-Mahdi. Dalam propagandanya ia

³⁷*Ibid.*, h. 342.

³⁸Fazlur Rahman, *Islam* (Chicago and London: University of Chicago Press, 1977), h. 47.

mendapat sukses karena jasa Abu 'Abdullah as-Syi'i, sesudah ia lolos dari tempat penahanannya di Sijilmasah, ia dapat menguasai daerah Kairuwan dan Magrib (Afrika). Dalam perkembangan selanjutnya, anak keturunan al-Mahdi ini akhirnya dapat menguasai Mesir dan mendirikan dan sektenya yang paling agresif adalah golongan Qaramitah yang dipelopori oleh Hamdan ibn Qarmat di penghujung abad ke-3 H/9 M. Gerakannya bertujuan, di bidang politik, membantu berdirinya dinasti Fatimiyyah di Mesir, sedangkan di bidang sosial, membangun masyarakat yang didasarkan atas asas kebersamaan. Mereka hidup dalam suatu komune yang hampir menyerupai sistem kehidupan masyarakat komunis. Kepercayaan aliran ini terhadap al-Mahdi, tidak jauh berbeda dengan keyakinan Syi'ah Isna 'Asyariyyah. Hanya saja pengikut sekte Qaramitah ini menganggap Muhammad ibn Isma'il sebagai al-Mahdi atau al-Qa'im. Ia masih hidup dan tidak akan mati serta akan kembali lagi ke dunia dan memenuhi bumi dengan keadilan. Menurut keyakinan mereka, berita kemahdiannya telah disampaikan oleh imam-imam pendahulunya.³⁹

Selain aliran Qaramitah, muncul pula golongan Druziyyah, yang dipimpin dan didirikan oleh ad-Durzi. Tampaknya aliran ini rapat hubungannya dengan Syi'ah al-Hakimiyyah yang lahir di masa al-Hakim bin Amrillah al-Fatimi yang memerintah Mesir di tahun 386 H. Dialah yang didewa-dewakan sebagai tuhan.⁴⁰

Dalam hubungan ini, menurut salah satu riwayat, dia adalah Hamzah ad-Durzi yang datang dari Persia ke Mesir, kemudian membujuk al-Hakim agar dirinya diperbolehkan untuk mempropagandakan paham baru yaitu bahwa al-Hakim adalah tuhan, sehingga manusia mau menyembahnya. Sangat boleh jadi, ajaran tentang Hulul dan Tanasukh versi aliran Druziyyah ini, dipengaruhi oleh ajaran al-Hallaj (858 - 922 M), yang dalam konsep filsafat ketuhanannya, menjelaskan bahwa Tuhan mempunyai sifat-sifat kemanusiaan (an-Nasut), dan manusia pun memiliki sifat-sifat ketuhanan (al-Lahut). Kemudian ajaran ini oleh ad-Durzi diterapkan pada diri al-Hakim yang dipropagandakan sebagai tuhan.⁴¹

Doktrin esoteris ciptaan Syi'ah Batiniyyah yang inovatif, terutama dalam menginterpretasikan ayat-ayat al-Quran, adalah benar-benar jauh dari ruh Islam dan

³⁹Muhammad Al-Bahi, *Al-Fikrul-Islami fi Tatawwurihi* (Mesir: Darul-Fikr, 1971), h. 79.

⁴⁰*Ibid.*, h. 80.

⁴¹Ahmad Amin, *Duhal-Islam*, Juz III, cet. VII (Qahirah: Maktabah an-Nahdatul-Misriyyah, tt.), h.

mengingatkan kita pada aliran kebatinan Gatholoco di Jawa. Sekte ini pada masa Aga Khan, sewaktu Inggris berkuasa di India, demikian Ahmad Syalabi menjelaskan, dijadikan sebagai alat untuk menghancurkan Islam dan menguasai ummat Islam dengan hak dan kewajiban yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Taktik Inggris ini rupanya sama dengan yang dilakukannya terhadap golongan Ahmadiyah, yaitu untuk membantu kepentingan Inggris di India. Dalam kerjasamanya dengan Inggris, aliran Batiniyyah atau Isma'iliyyah ini, mendapat kebebasan menyebarkan pahamnya di koloni-koloni Inggris, dan sebagai imbalannya, aliran ini harus patuh pada Inggris.

e. Syiah Isna 'Asyariyyah

Aliran ini lebih luas pengaruhnya dan lebih kuat posisinya sampai hari ini bila dibandingkan dengan pengaruh dan posisi aliran-aliran Syi'ah lainnya. Mayoritas pengikut sekte ini tinggal di Iran dan Irak. Aliran ini didirikan sesudah abad ke-3 H, akan tetapi ada pula yang berpendapat, bahwa ia lahir sesudah hilangnya Muhammad al-Mahdi al-Muntazar secara misterius pada tahun 260 H.⁴²

Keimaman pada sekte ini, sesudah Ja'far as-Sadiq, adalah Musa al-Kazim, sesudah itu jabatan imam dipegang oleh puteranya, 'Ali Rida. Dialah satu-satunya Imam Syi'ah dari Ahlul-Bait yang diangkat sebagai putera mahkota oleh Khalifah al-Ma'mun dari dinasti 'Abbasiyyah. Kemudian keimaman sesudahnya beralih kepada puteranya Muhammad at-Taqi, dan selanjutnya ia pun digantikan oleh puteranya 'Ali an-Naqi atau al-Hadi. Ia tinggal di Madinah dan memberi pengajaran di sana. Akibat kritik-kritiknya yang tajam terhadap Khalifah al-Mu'tasim, ia dipenjarakan di Samarra sampai wafatnya tahun 254 H/ 868 M dalam usia 40 tahun. Selanjutnya keimaman beralih kepada puteranya, Hasan al-'Askari, yang dikenal sebagai Imam yang tekun dan menguasai beberapa bahasa.⁴³

Pada masa keimamannya, perpecahan Syi'ah Isna 'Asyariyyah ini semakin meluas, dan banyak diantara para pengikutnya, terutama kaum 'Alawiiyun (pengikut 'Ali ibn Abi Talib) mendakwahkan dirinya sebagai imam. Menurut asy-Syahrastani, Hasan al-'Askari wafat dalam usia 28 tahun (260 H/874 M) di Samarra. Kemudian diangkatlah puteranya, Muhammad ibn Hasan al-'Askari sebagai imam yang ke-12, yang dimitoskan sebagai al-Mahdi al-Muntazar karena ia dianggap hilang secara

⁴²Saleh A. Nahdi, *Masalah Imam Mahdi* (Surabaya: Raja Pena, 1966), h. 45.

⁴³*Ibid.*, h. 46.

mimana para penguasanya mengklaim bahwa diri mereka adalah masih keturunan Musa al-Kazim. Mereka menjadikan ajaran sekte ini sebagai mazhab resmi pemerintahan Safawi di Persia. Pada masa Syah Isma'il, ia memerintahkan kepada para Khatib dan Mu'azzin mengubah formula khutbah dan azistarius, sejak ia dalam usia kanak-kanak. Dia akan kembali lagi ke dunia dan memenuhinya dengan keadilan, sebagaimana bumi ini dipenuhi oleh kecurangan.⁴⁴

Demikian menurut keyakinan pengikut Syi'ah Isna 'Asyariyyah. Aliran ini sejak berdirinya sampai hilangnya Imam ke-12, tampaknya kurang terorganisasikan. Akan tetapi, demikian Gibb dan Kramers menjelaskan bahwa dalam perkembangan selanjutnya, aliran ini pernah mengalami kemajuan pesat, terutama setelah berdirinya dinasti Safawiyah, yaitu dengan menyebutkan nama-nama kedua belas Imam mereka dalam khutbah dan menambahkan kalimat dalam azannya, formula semacam ini tentunya dimaksudkan untuk menunjukkan ciri khas kesyiah.

Adapun doktrin keagamaan dalam teologi Syiah dapat dipaparkan sebagai berikut:

a. *Imamah*

Syi'ah *Imamiyyah* adalah bentuk utama dari Syi'isme yang didukung oleh kelompok berhaluan moderat. Mereka adalah orang-orang yang menghindari cara-cara revolusioner untuk menjatuhkan Sunni yang sedang berkuasa.⁴⁵ Pada abad ini, sebagian Jazirah Arab dikuasai kaum Syi'ah. Di antaranya beberapa kota besar seperti Uman dan Sa'dah.⁴⁶

Semua golongan yang bernaung dengan nama *Imamiyyah* sepakat, bahwa imam pertama adalah 'Ali bin Abi Talib. Kemudian secara berturut-turut Hasan, Husein, 'Ali bin Husein, Muhammad al-Baqir, dan Ja'far al-Sadiq. Sesudah itu, mereka berbeda pendapat mengenai siapa imam pengganti Ja'far al-Sadiq.⁴⁷

⁴⁴*Ibid.*, h. 47.

⁴⁵Joel L. Kreaemex, *Humanism in The Renaissance of Islam; The Cultural Revival During the Buyid Age* (Leiden: E. J. Brill, 1986), h. 65.

⁴⁶Di antara kota yang pada abad ke-4 H telah dikuasai kaum Syi'ah adalah Tripoli, Nablus, Tiberias, Aleppo, Neisyapur dan Heart. Di sana terdapat banyak kaum Syi'ah, seperti juga di Ahwaz dan pesisir Teluk Persi di kawasan Persia. Muhammad Husein al-Tabataba'i, *Shi'te Islam* (Houston: Free Islamic Literature, 1979), h. 64.

⁴⁷Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jilid V (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), h. 8.

Salah satu respon paling awal dan terperinci terhadap masalah suksesi adalah masalah *imamah*. Doktrin Syi‘ah tersebut berangkat dari keyakinan akan penunjukan Nabi atas diri ‘Ali sebagai khalifah penggantinya dengan penunjukan yang jelas berdasarkan hadis *gadir*. Di dalamnya termaktub adanya fungsi spiritual dalam diri penerus Nabi dari kalangan *ahl al-bait* yang berhubungan dengan penafsiran esoterik tentang wahyu dan kelangsungan ajaran esoterik Nabi Saw.⁴⁸ Mohammad Ayyoub mengatakan, bahwa doktrin *imamah* dirumuskan oleh sekelompok minoritas yang teraniaya dan baru muncul beberapa abad setelah Nabi wafat.⁴⁹

Dalil, paham *Imamah* didasarkan pada Q.S. Yunus (10): 35. Q.S. al-Maidah [5]: 55). Adapun hadis yang menjadi dasar doktrin *imamah* adalah hadis *gadir* yang dikumandangkan Nabi ketika haji wada’, yang dikutip langsung sebagai dalil untuk mendukung hak ‘Ali atas khilafah.⁵⁰

Menurut Syi‘ah, doktrin *imamah* dikemukakan oleh Nabi dalam haji wada’ di Gadir Khumm, suatu tempat antara Makkah dan Madinah. Doktrin ini menyatakan, bahwa ‘Ali sebagai pengganti (*khalifah*) Nabi yang sah. Doktrin ini juga dipahami sebagai contoh dari upaya awal untuk merumuskan struktur politik dalam kerangka hukum, serta memberikan suatu teori politik yang koheren. Akan tetapi, prinsip dasar tentang suksesi yang dikemukakan oleh doktrin ini tidak pernah diterima secara universal, dan tetap menjadi harapan eskatologis yang tak realistis. Sebagaimana terdapat beberapa kesulitan dalam menafsirkan dan menerjemahkan sunnah Nabi ke dalam teori politik terlihat dalam sejarah hadis yang mendasari doktrin tersebut.⁵¹

Dalam pandangan kaum Syi‘ah, Imam bukan sekedar penguasa yang wajib ditaati. Ia merupakan satu-satunya wewenang dalam menafsirkan dan mengimplementasi-kkan hukum Tuhan. *Imamah* dalam pandangan Syi‘ah—dalam hal ini—sama dengan kenabian. Ia dianggap seorang yang *ma’sum* oleh Tuhan dari segala kesalahan. Ia (imam) juga diberi pertolongan dan mukjizat Ilahi sebagai tanda Keimamannya. Orang-orang Syi‘ah juga menetapkan sifat-sifat imam sebagai syarat. Ia

⁴⁸Seyyed Hossein Nasr, *Ideals and Realities of Islam* (London: Aquarian, 1994), h. 150

⁴⁹Mahmoud M. Ayoub, *The Crisis of Muslim History: Akar-Akar Krisis Politik dalam Sejarah Muslim*, terj. Munir A. Mu’in (Bandung: Mizan, 2004), h. 203.

⁵⁰Ibn Abi al-Hadid, *Syarh Nahj al-Balagh*, Jilid II (t.tp.: Dar al-Rasyad al-Hadisah, t.th.), h. 21-26.

⁵¹Ayoub, *The Crisis*, h. 34.

haruslah seorang yang dapat memberi petunjuk kepada manusia atas jalan yang benar dan melarang berbuat salah dalam hukum. Seorang imam harus lebih mulia dan utama di mata rakyatnya dalam hal ilmu pengetahuan dan akhlak.⁵² Sesuatu yang membedakan *imamah* dengan Kenabian adalah, *imamah* sebagai penjaga bagi risalah, sedangkan Kenabian sebagai pendirian dari risalah. Dalam eksistensi dan perilakunya, imam diyakini sebagai manifestasi rahmat Ilahi, sehingga penciptaan dan pengangkatannya wajib atas Tuhan.⁵³

Sebagai penyempurnaan rahmat Tuhan dengan menciptakan dan mengangkat Imam, *imamah* juga sebagai manifestasi keadilan Ilahi. Prinsip keadilan Ilahi, yang berarti rahmat Ilahi, merupakan satu dari lima asas teologi Mu'tazilah. Meskipun Mu'tazilah tidak menerima doktrin *imamah* Syi'ah, doktrin tersebut (*Imamah Syi'ah*) diadopsi atas prinsip-prinsip Mu'tazilah.⁵⁴

Ada beberapa alasan mengenai doktrin *imamah* Syi'ah. *Pertama*, doktrin itu memberikan basis sekaligus kriteria bagi perdebatan teologis dan hukum seputar masalah penting suksesi, suatu masalah yang memainkan peranan utama dalam kemunculan dan perkembangan aliran-aliran dan mazhab-mazhab utama pada masa Islam awal. *Kedua*, doktrin itu memberikan kerangka sekaligus kriteria bagi perdebatan hukum dan teologis berikutnya mengenai kekuasaan spiritual/idiologi dan duniawi/praktis dari imam sebagai pengganti Nabi. *Ketiga*, doktrin itu memberikan basis dan karakter doktrin sufi tentang *qutub* (kutub) atau manusia sempurna yang dikatakan sebagai sandaran eksistensi dan kesejahteraan alam semesta.⁵⁵

Dari sini terlihat bahwa antara Syi'ah dan Sufisme memiliki pandangan sama pada gerakan protes terhadap kekuasaan zalim, kekayaan dan semangat duniawi imperium muslim. Walaupun masalah tersebut bersifat politis dan tidak jarang revolusioner, protes sufisme berwujud pada era formasi sejarah sufi, dalam hal ketidaksetujuannya pada asketis terhadap dunia dengan segala bentuk kemewahan dan hingar-bingarnya. Hal ini dipertegas dengan klaim yang dilontarkan seorang tokoh Syi'ah yang terkenal pada abad XIV, yaitu Haydar Amuli yang menyatakan, bahwa

⁵²Aboe Bakar Aceh, *Syi'ah Rasionalisme dalam Islam* (Solo: Ramadhani, 1988), h. 24.

⁵³Ayoub, *The Crisis*, h. 204.

⁵⁴*Ibid.*, h. 205.

⁵⁵*Ibid.*, h. 204.

“Syī‘ah yang hakiki adalah Sufisme, dan sebaliknya Sufisme yang hakiki adalah Syī‘ah”. Dari timbal balik antara Sufisme dan Syī‘ah tersebut menghasilkan sebuah kecondongan baru kaum Syī‘ah pada hal-hal esoteris mistis dengan berlandaskan pada nilai-nilai filosofis faham Syī‘ah⁵⁶ sebagai sarana untuk menguatkan keyakinan-keyakinan mereka.

b. Mahdiyyisme

Dalam akidah Syiah, kemunculan Imam Mahdi adalah permasalahan yang sudah pasti, persis dengan ungkapan akan munculnya *Yaum al-Mau‘ud* (hari kiamat). Hari yang dijanjikan dengan kemunculan Imam Mahdi adalah langkah awal untuk menuju Hari Akhir yang telah dijanjikan Allah.

Gagasan tentang Mahdi tidak semata-mata dimonopoli oleh Islam, meskipun nama Mahdi itu merupakan nama Islam. Memang, gagasan tentang penyelamat terakhir merupakan suatu gagasan yang usianya setua agama itu sendiri.⁵⁷ Seperti dikutip oleh Henry Corbin, bahwa esoterisme Syī‘ah mengajarkan hierarki mistis yang tidak kasatmata. Ide dasarnya yang paling khas adalah *gaiban* (*gaybah*) atau absennya imam.⁵⁸ Ide hierarki semacam ini identik—untuk tidak mengatakan sama—dengan berbagai agama yang menguasai dunia, seperti Hindu, Budha, Kristen, Zoroaster dan Islam, bahwa terdapat petunjuk tentang orang yang akan datang selaku juru selamat bagi umat manusia. Agama-agama ini biasanya memberi kabar gembira tentang kedatangan “sang juru selamat”, meskipun tentunya terdapat perbedaan tertentu dalam perinciannya, yang bisa diketahui apabila diadakan perbandingan yang cermat tentang agama-agama ini.⁵⁹

Muhammad al-Mahdi, dipercaya golongan ini diberikan Tuhan kehidupan panjang sampai akhir dunia, tetapi ia berada dalam alam gaib. Imam Mahdi hidup sebagaimana Elijah, yang menurut kepercayaan Yahudi diangkat ke surga dan hidup di sana. Pada akhirnya, perdebatan mengenai kemunculan al-Mahdi mendorong para pemikir dan agamawan untuk memberikan penafsiran tentang Mahdi atau Messiah

⁵⁶Hamid Enayat, *Modern Islamic Political Thought: The Respons Of The Shi‘i and Sunni Muslim To The Twentieth Century* (London: The Macmillan Press, 1982), h. 18.

⁵⁷Mohammad Saeed Bahmanpour, “Prawacana” dalam Oliver Leaman, *Pemerintahan Akhir Zaman*, terj. ‘Ali Yahya (Jakarta: al-Huda, 2005), h. xvi.

⁵⁸“Pendahuluan” dalam Henry Corbin, *Imajinasi Kreatif Sufisme Ibn Arabi*, terj. M. Khozim dan Suhadi (Yogyakarta: LKiS, 2002), h. 16.

⁵⁹Tabatab‘i. *Shi‘te*, h. 243.

“Sang Juru Selamat“. Di antara tanda-tanda kemunculannya adalah ketika bumi ini telah dipenuhi dengan kerusakan, kebobrokan, ketidakadilan dan penindasan yang merajalela. Kemunculan al-Mahdi akan memenuhi bumi dengan keadilan dan persamaan (hak), dan penegakan moral.⁶⁰

Keadilan merupakan suatu gagasan yang usianya setua eksistensi manusia (di bumi). Keadilan menempati posisi puncak dari seluruh nilai-nilai kemanusiaan, menempati posisi final dari segala sesuatu yang dihargai dalam wilayah interaksi manusia, dan merupakan cita-cita yang sangat indah dari semua bangsa. Oleh sebab itu, konsep Imam Mahdi dalam Islam mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan konsepsi Islam mengenai keadilan dan persamaan hak.⁶¹

Dari penafsiran mengenai “Sang Juru Selamat” oleh para pemikir dan agamawan tersebut, sering terjadi kesalahpahaman terutama oleh kaum Yahudi, juga mereka yang tidak menerima Isa as. putera Maryam sebagai Messiah. Mereka berharap “Sang Juru Selamat“ segera muncul dengan melakukan dosa-dosa besar dan kezaliman di muka bumi. Prinsip tersebut mengundang kritik pandangan dunia materialisme terhadap konsep kepercayaan tentang Juru Selamat, bahwa konsep ini sebenarnya memberangus aktivitas otak manusia, membelenggu kesadaran manusia dan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan serta tanggungjawab manusia. Karena pengikut akan kepercayaan ini berkeyakinan bahwa perbaikan sosial, pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme tidak berada di tangan manusia. Sehingga manusia tidak bertanggung jawab atas keterpurukan dan dekadensi moral, manusia tidak mempunyai pilihan dan andil sama sekali dalam memutuskan nasib sendiri, dan tidak memiliki *taklif* untuk menegakkan keadilan dalam masyarakat. Tanggung jawab ini sepenuhnya diserahkan oleh sosok yang akan muncul di masa depan, yang akan menyelamatkan manusia dari kerusakan dan keadaan yang menyedihkan.

Akan tetapi, berbeda dengan kegaiban al-Mahdi dan masa penantiannya dalam Syi‘ah. Dalam proses menyambut kehadiran Sang Juru Selamat, atau masa gaibnya imam zaman dijadikan kekuatan untuk memobilisasi umat dan terus beraktifitas sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan oleh al-Qur’an dan Hadis. Imam yang

⁶⁰Leaman, *Pemerintahan Akhir*, h. xvi.

⁶¹*Ibid*, h. xvi.

kedua belas ini tetap menjadi pemimpin di dunia secara tersembunyi dan dapat muncul atau memperlihatkan diri kepada orang-orang yang memiliki kondisi spiritual tertentu. Dalam hal ini, Tuhan telah membatasi pengetahuan manusia dan membuat “keajaiban” mengenai “penyembunyian” Mahdi, seraya mempercayakan kepada komitmen moral untuk meyakini janji tentang keselamatan.

Imam Khomeini mengatakan: ”Sesungguhnya tidak ada manusia seperti Imam Mahdi, yang di dalam gaibnya diumpamakan seperti matahari yang berada di balik awan. Dia tersembunyi di balik awan, tetapi dengan sinarnya hari-hari tetap terang, sehingga kehidupan di muka bumi berjalan sebagaimana adanya. Dunia seakan lupa, bahwa hukum kausalitas merupakan gerak yang menuju pada kesempurnaan, sedang kehidupan materi adalah kehidupan yang tidak pernah akan membawa manusia pada satu titik kesempurnaan apapun. Saat ini manusia tengah diselubungi kegelapan kehidupan materi sehingga tidak dapat melihat cahaya kebenaran. Bukannya kebenaran yang tidak ada, tetapi materi telah menutupi mata hati mereka untuk dapat melihat kebenaran. Tidak heran jika sebagian kaum muslimin pun hanya menimbang nilai-nilai kebenaran dengan materi, karena telah terbelenggu dengan cara berfikir materialisme. Nilai-nilai kebenaran materi telah membenamkan indrawi manusia pada kegelapan khayal yang melupakan akan hakekat mereka.⁶²

Oleh karena itu, pemimpin atau *syaiikh* yang sempurna bukanlah seorang penguasa yang baik dan adil *an sich*, melainkan manusia sempurna yang tak dikenal. Ia adalah wakil Tuhan di bumi, yang rahmat dan berkah kehadirannya sangat diperlukan bagi kesejahteraan dunia. Imam juga menjadi bukti (*hujjah*) Tuhan atas ciptaan-Nya. Ia adalah pilar atau tiang (*arkan*) bumi, yang tanpa kehadirannya bumi akan berguncang dan lebur. Masalah ini juga didasarkan atas kebutuhan manusia akan kehidupan dunia yang damai dan tentram serta terwujudnya keadilan di muka bumi, ketika manusia memiliki kebajikan dan kesempurnaan. Harapan seperti ini akan terwujud melalui tangan manusia dengan pertolongan Tuhan.

Lebih jauh, berhubungan dengan sisi esoterik-mistik semacam ini ditegaskan oleh Henry Corbin, merupakan tunas spiritual yang muncul dari perpaduan dua aliran,

⁶²M. Turkan, “Mahdiisme: Sebuah Penantian” dalam <http://www.islamalternatif.com>, Jum’at, 8 Januari 2013.

yakni *Isyraqi* Suhrawardi dan Ibn 'Arabi, kemudian menciptakan situasi penting bagi hubungan antara Sufisme dan Syi'ah. Signifikansi kedua arus tersebut dalam Islam terlihat jelas, yang satu menyinari yang lain. Sehingga terlihat bahwa ide hierarki mistik dalam doktrin Ibn 'Arabi dan sufisme pada umumnya memuat jejak Syi'ah yang asli. Selain itu, terlihat bahwa silsilah berbagai cabang sufisme juga bersumber kembali kepada salah satu imam suci Syi'ah, terutama Imam Keenam, yaitu Ja'far al-Sadiq (w. 148/756) atau Imam Kedelapan, yaitu Imam 'Ali Rida (w. 203/819). Persumberan Syi'ah pada cakrawala spiritual ini menyiapkan jalan bagi jawaban baru atas pertanyaan yang muncul sejalan dengan hadirnya sufisme dalam Islam.⁶³

c. *Ismah*

Seperti banyak diungkap oleh kaum modernis, bahwa gagasan mengenai *Imamah*, sebagai jabatan yang diwariskan, dianggap bertentangan dengan teori modern tentang konsep demokrasi. Menurut kelompok pembaharu tersebut, konsep *imamah* juga bertolak belakang dengan nilai-nilai al-Qur'an yang mengajarkan bahwa hanya amal saleh yang bisa meninggikan derajat seseorang, bukan keturunan yang menentukannya. Dalam Syi'ah, seorang Imam mempunyai tingkatan kemaksuman. Ia haruslah seseorang yang memiliki sifat maksum, karena seorang yang mendapat tugas membawa amanat Allah Swt., jika tidak bersifat maksum maka akan timbul keraguan atas kebenaran risalah atau amanah yang dibawanya.

Doktrin *ismah* merupakan proses pengembangbiakan dari hadis Gadir Khumm. Ajaran ini berkenaan dengan prasyarat *imamah* yang menyatakan, bahwa seorang Imam sama sekali tidak dapat dicela, sifat dan tindakan-tindakannya menempatkan ia di atas derajat orang-orang biasa. Dia merupakan legislator sekaligus eksekutor, tetapi tindakannya tidak pernah dipertanyakan. Dia adalah tolok ukur baik dan buruk, apa yang dilakukannya adalah baik, apa yang dilarangnya adalah buruk. Ia merupakan pemimpin rohani sejati, kewenangan rohaninya mengungguli kewenangan Paus dalam gereja Katolik.⁶⁴

Dengan kata lain, bahwa seorang imam adalah orang yang menjalankan fungsi wilayah, mempertahankan dan menjamin kesinambungan hukum agama dengan

⁶³Corbin, *Imajinasi*, h. 26.

⁶⁴Enayat, *Modern Islamic*, h. 44.

bantuan cahaya ke-Tuhanan dalam dirinya. Oleh karena itu, sebagai akibat dari adanya cahaya ke-Tuhanan dalam dirinya, imam mempunyai potensi untuk tidak melakukan kesalahan dalam soal-soal spiritual dan keagamaan. Ia merupakan penjaga dan penafsir wahyu *par excellence*, memerintah kaum muslimin sebagai wakil Nabi, menafsirkan ilmu-ilmu dan hukum-hukum agama bagi manusia dalam arti batinnya, membimbing manusia pada wilayah spiritual. Batinnya adalah semurni Nabi yang menjadi sumber cahaya ini. *Isma*h para Imam dipandang sebagai konsekuensi logis dari “cahaya Muhammad” dalam diri mereka, sebab cahaya inilah yang menjadi sumber segala petunjuk dan pengetahuan. Memperoleh cahaya ini berarti terhindar dari kesalahan.

Kepercayaan kaum Syi‘ah terhadap kema’suman Imam setingkat dengan Nabi saw., yang kema’sumannya melebihi segala keraguan. Jika diketahui bahwa Nabi telah membuat suatu pernyataan tertentu, maka tidak ada seorangpun yang dapat meragukan kejujurannya. Tidak dapat dibayangkan, bahwa orang yang diutus oleh Allah Swt. sebagai pembawa petunjuk bagi umat manusia yang sedang membutuhkan petunjuk pernah membuat suatu kesalahan atau berbuat dosa. Dapat dipastikan bahwa para pengikutnya akan menyatakan Sang Imam tidak *ma’sum*. Lebih lanjut, ia merupakan rahmat Ilahi, karena rahmat ini membawa pada ke-*ma’sum*-an. Oleh karena itu dapat diakui, bahwa *imamah* adalah suatu tambahan kepada doktrin kenabian, yang memiliki peran untuk menguraikan masalah-masalah agama. Dan Imam itu *ma’sum* dengan alasan yang sama seperti Nabi.⁶⁵ [28]

Dari sebuah manifestasi atau pemunculan diri (*mazhar*) dari cahaya pertama, maka penisbatan *Isma*h kepada imam hanya sebatas sifat-sifat Ilahi saja. Adanya ke-*ma’sum*-an sang imam dianggap sebagai sebuah kemestian. Implikasinya terwujud pada doktrin *imamah* yang menjelma dan menempati kedudukan yang sentral, sehingga kepercayaan dan kepatuhan kepada imam menjadi rukun iman yang ketiga sesudah kepercayaan kepada Tuhan dan Rasul-Nya.

d. Taqiyyah

Selain gaya esoterisme Syi‘ah yang diajarkan dalam rangka membumikan kebenaran-kebenaran agama, terutama dipelihara oleh aliran Isma‘iliyah. Adalah

⁶⁵Murtada Mutahhari, *Imamah dan Khilafah*, terj. Satrio Pinandito (Jakarta: CV. Firdaus, 1991), h. 76.

doktrin *taqiyyah* (*expedient dissimulation*) atau bisa diartikan sebagai penyamaran yang perlu.⁶⁶

Sebagai kelompok minoritas di tengah-tengah masyarakat Islam dunia, kaum Syi'ah seringkali mengalami kecaman dan penindasan di bawah rezim yang memusuhi keyakinan mereka. Ketika menghadapi kekuasaan kaum Yuris yang picik, Syi'isme terpaksa menyembunyikan kebenaran dari dirinya sendirinya. Saat itulah kaum 'urafa' berlandung pada *taqiyyah*.⁶⁷

Secara etimologi, kata *taqiyyah* berasal dari bahasa Arab, dari akar kata *waga-yagi* yang berarti melindungi atau menjaga diri. Dari terjemahan tersebut, maka praktek *taqiyyah* diartikan—sebagaimana dikatakan oleh al-Tabataba'i—bahwa *taqiyyah* lebih tepat diartikan dengan seseorang yang menyembunyikan agamanya atau beberapa praktek tertentu dari agamanya dalam keadaan yang mungkin atau pasti akan menimbulkan bahaya sebagai akibat tindakan-tindakan dari orang-orang yang menentang agamanya atau praktek-praktek keagamaan tertentu.

Pandangan Syi'ah terhadap mayoritas tampaknya akibat dari teori legitimasinya mengenai suksesi Nabi, terutama yang membatasi hak pemerintahan yang sah pertama-tama pada anggota keluarga beliau (*ahl al-bait*). Semua teori politik yang mempunyai pandangan yang demikian eksklusif cenderung melahirkan eksponen-eksponen yang dengan penuh rasa cemburu menjaga kemurniannya dari pemikiran-pemikiran yang baur mengenai otoritas.⁶⁸

Dalam perjalanan sejarahnya, golongan Syi'ah bisa disebut sebagai kelompok “minoritas” di tengah-tengah masyarakat Islam dunia, karena seringkali mengalami kecaman dan penindasan di bawah rezim yang memusuhi keyakinan mereka. Pendiriannya mengenai perlunya praktek *taqiyyah* didasarkan pada pertimbangan rasional, yaitu saran untuk berhati-hati sebagai kelompok yang tertindas. Maka, satu-satunya jalan bijaksana yang mesti mereka tempuh adalah menghindar dari tindakan-tindakan yang akan menghadapkan diri mereka pada resiko pemusnahan karena mempertahankan keyakinan-keyakinan mereka secara terang-terangan. Meskipun mereka tidak pernah meninggalkan misi mereka manakala peluang untuk itu ada. Hal

⁶⁶Enayat, *Modern Islamic*, h. 21.

⁶⁷*Ibid.*, h. 22.

⁶⁸*Ibid.*

ini dalam rangka menggenjot kesadaran kaum Muslim dengan jalan memberontak terhadap penguasa-penguasa yang tidak saleh.⁶⁹

Selain pertimbangan rasional esoterik, penegasan mengenai adanya *taqiyyah* juga didasarkan pada ayat al-Qur'an, antara lain Q.S. 'Ali 'Imran (3): 28: "Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barangsiapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. Dan Hanya kepada Allah kembali(mu)."

Ayat tersebut menegaskan sebuah peringatan kepada kaum beriman untuk tidak mengutamakan orang-orang kafir daripada orang-orang yang beriman untuk dijadikan teman. *Auliya'* berarti teman yang akrab, juga berarti pemimpin, pelindung atau penolong.

Adapun dalam Q.S. al-Nahl (16): 106, dijelaskan tentang pengecualian terhadap hukum Tuhan dan seseorang yang menarik kembali imannya karena tekanan atau suatu paksaan. "Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menyimpannya dan baginya azab yang besar".

Para mufassir Syi'ah meyakini, bahwa ayat kedua ini ditujukan kepada Ammar Ibn Yasir, salah seorang sahabat Nabi terkemuka yang disiksa oleh orang-orang kafir dan dipaksa untuk meyakini *Polytheisme*. Selanjutnya, ayat ketiga dari bagian kisah Nabi Musa, Q.S. al-Mu'min (107): 28: "Dan seorang laki-laki yang beriman di antara pengikut-pengikut Fir'aun yang menyembunyikan imannya berkata: "Apakah kamu akan membunuh seorang laki-laki karena dia menyatakan: "Tuhanku ialah Allah padahal dia Telah datang kepadamu dengan membawa keterangan-keterangan dari Tuhanmu. Dan jika ia seorang pendusta maka dialah yang menanggung (dosa) dustanya itu; dan jika ia seorang yang benar niscaya sebagian (bencana) yang diancamkannya kepadamu akan menimpamu". Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang melampaui batas lagi pendusta".

⁶⁹*Ibid*, h. 175.

Di samping ayat-ayat di atas, banyak ungkapan yang dinisbatkan kepada para Imam, khususnya Imam Keenam, Ja'far al-Sadiq yang mengharuskan adanya *taqiyyah* sebagai esensi agama. Selain itu, Imam Ja'far juga mengungkapkan bahwa *taqiyyah* merupakan ciri-ciri agamaku dan agama nenek moyangku.

Begitu juga berkaitan dengan perjuangan kaum mukmin pada masa awal Islam yang hidup di tengah-tengah kaum musyrik dan fanatik, maka diperlukan adanya sebuah tameng untuk melindungi diri dalam menghadapi lawan. Hal tersebut juga dinyatakan oleh Imam Ja'far al-Sadiq dalam kitabnya *Rasail al-Syi'ah*: “*taqiyyah* adalah tameng orang mukmin”.

Mewakili kelompok yang mempunyai kecondongan mistik-filosofis, kaum Syi'ah merasa perlu menerangkan paham *taqiyyah* dari sisi esoteris paham Syi'ah. Dengan argumentasi, bahwa fungsi para Imam sebagai penyimpan kebenaran agama yang diamanatkan kepada mereka. Selaku pembawa amanat suci, maka pengetahuan mereka tentang kebenaran tidak bisa disebarluaskan kepada umum. Hal ini akan membawa dampak negatif, yaitu terkorbankannya klaim mereka dan kedudukan mereka yang istimewa, serta pengetahuan mereka menjadi semacam penjerumusan pada bahaya salah paham.

Dalam prakteknya, kadang *taqiyyah* telah menjadi norma atau perilaku umum setiap kali terjadi konflik antara iman dan kebutuhan. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan kaum modernis Syi'ah yang menyatakan, bahwa *taqiyyah* kadang-kadang merosot menjadi dalih bagi kemunafikan dan kepengecutan yang nyata. Oleh karena itu, diperlukan telaah ulang atas pemaknaan *taqiyyah* guna mengubahnya dari suatu kamufase bagi pasivitas politik menjadi alat aktivitas.

Pada dasarnya sikap berhati-hati dan berjaga-jaga ini tidak terbatas pada kaum Syi'ah semata, mazhab-mazhab lain juga menggunakan praktek serupa dalam menghadapi ancaman-ancaman para penindas. Prinsip ini sebenarnya lunak, juga diterima oleh ortodoksi, terutama oleh Abu Hanifah dengan menunjukkan pada Q.S. 'Ali 'Imran (3): 27.

Akan tetapi, kaum ortodoksi lebih menekankan pada integritas moral yang tinggi dan menegaskan bahwa keketatan adalah lebih tinggi derajatnya daripada

kelonggaraan. Sebaliknya, prinsip Syi'ah tersebut menjadi alat utama untuk menyembunyikan keyakinan⁷⁰, dan secara berjalin-kelindan menjadi ciri khas Syi'ah. Lebih jauh, penyembunyian seperti ini tidak hanya diizinkan, tapi merupakan kewajiban yang fundamental. Kaum Syi'ah tidak sekadar mempraktekannya saja, tapi juga menisbatkan *Taqiyyah* kepada imam-imam mereka, termasuk 'Ali, yang mereka katakan telah "menyembunyikan" keyakinannya yang kuat akan hak pemberian Tuhan atas kedudukan kekhilafahan, dan bersikap mengalah terhadap khalifah-khalifah pendahulunya.⁷¹

e. *Marja' iyyah*

Marja' iyyah, yang kemudian menjelma ke dalam *Wilayat al-faqih*, merupakan sebuah doktrin keagamaan yang juga menduduki posisi sentral dalam Syi'ah. Karena doktrin tersebut nantinya akan menentukan bagaimana masyarakat akan menjalani sebuah pemahaman keagamaan, baik yang bersifat *ta'abbudi* maupun *i'tiqadi*.

Marja' iyyah berasal dari kata *marja'*, yang artinya tempat kembalinya sesuatu, atau tempat kembali dalam persoalan-persoalan agama. Dalam pandangan Syi'ah, kemunculan *marja'* disebabkan karena gaibnya Imam Mahdi, lebih tepatnya setelah gaibnya Imam Keduabelas.

Konsep *Marja' iyyah* ialah proses pelimpahan tanggungjawab kepemimpinan kepada para fugaha yang bersifat adil dan mempunyai kemampuan memimpin dari Imam Mahdi. Dalam hal ini, setiap orang Syi'ah yang tidak mampu mengambil kesimpulan hukum dalam permasalahan keagamaan sehari-hari harus merujuk kepada orang yang lebih tahu, yaitu para Ulama atau Fugaha. Hal ini disebabkan karena para Fugaha merupakan penerus kepemimpinan Imam Mahdi selama masa kegaibannya. Maka, wewenang atau kekuasaan yang dimiliki fugaha terhadap umat sangat besar. Lebih lanjut tentang konsep *marja' iyyah* adalah: *Pertama*, seseorang tidak boleh mengamalkan sebuah ajaran agama tanpa pemahaman dasarnya mengamalkan sesuatu. Dasarnya, ia melaksanakan sebuah pengamalan karena ia mengambil kesimpulan sendiri atau merujuk pada pandangan para ulama. *Kedua*, setiap hukum di dalam masyarakat senantiasa bertumpu kepada pendapat para ulama yang masih hidup, dan

⁷⁰Rahman, *Islam*, h. 127.

⁷¹*Ibid*, h. 252.

tidak boleh bertumpu dengan pendapat para ulama yang sudah mati. *Ketiga*, setiap pelaksanaan hukum merupakan pengamalan yang terkait dengan kesadaran bahwa Imam Mahdi sedang gaib, atau sebuah kesadaran bahwa mereka kembali kepada ulama karena kepemimpinan yang dipegang oleh Imam sedang gaib (*okultisme*). Jadi, jika seseorang merujuk kepada seorang ulama dalam seluruh doktrin keagamaannya, kemudian terdapat salah satu kewajiban yang tidak dipenuhinya, maka batallah keikutsertaannya, karena dalam Syi'ah tidak ada *talfiq* (percampuran pandangan). Dalam hal *marja' iyyah*, pada akhirnya umat harus patuh dan tidak boleh melanggar perintah mereka, karena menolak mereka sama saja menolak kepemimpinan Imam Mahdi itu sendiri.

B. Sunni

1. Latar Belakang Lahirnya Paham Sunni

Sejarah Sunni dimulai ketika ricuhnya perpolitikan yang mengatasnamakan Islam. Nabi Muhammad wafat sebelum menunjuk pengganti. Oleh karena itu, terjadi konflik tentang siapa yang paling pantas menggantikan beliau sebagai khalifah. Setelah ketegangan dan tarik-ulur selama dua hari sehingga menunda pemakaman jasad Nabi Muhammad, ditunjuklah Abu Bakar as-Shiddiq sebagai khalifah.⁷² Penunjukan ini tidak memuaskan beberapa kalangan. Bahkan, kalangan yang mengklaim bahwa Ali bin Abi Thalib lebih sah menjadi khalifah kemudian memisahkan diri dan membentuk Syiah.

Sementara itu, golongan yang lebih umum, kemudian disebut Sunni. Golongan ini hingga saat ini terbagi dalam empat mazhab berbeda. Yang perlu dicatat, empat mazhab tersebut tidak menandakan perpecahan. Perbedaan empat mazhab hanya terletak pada masalah-masalah yang bersifat “abu-abu”, tidak diterangkan secara jelas oleh Al-Quran atau hadits seiring dengan kemajuan zaman dan kompleksitas hidup muslim.⁷³

Empat Imam utama Sunni yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Syafii, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hambal. Mereka sama-sama mengambil ijtihad (upaya) dalam menyelesaikan masalah yang bersifat “abu-abu” tersebut.⁷⁴

⁷²Dewan Redaksi, *Ensiklopedi*, h. 521.

⁷³*Ibid.*

⁷⁴*Ibid.*, h. 522.

Adapun empat mazhab Sunni adalah sebagai berikut:

a. Mazhab Hanafi

Mazhab ini didirikan oleh Imam Abu Hanifah. Mazhab ini diikuti oleh 45% muslim dunia; jumlah yang paling besar di dunia. Penganut mazhab Hanafi kebanyakan terletak di Asia Selatan dan Asia Tengah. India, Libanon, dan Pakistan termasuk negara-negara yang berkiblat pada Imam Abu Hanifah.

b. Mazhab Syafi'i

Mazhab ini didirikan oleh Imam Syafi'i. Jumlah pengikutnya mencapai 28% muslim dunia. Umat Islam negara kita, Indonesia, dan beberapa negara Asia Tenggara lainnya (Malaysia, Brunei, Thailand, Singapura) berbasis pada mazhab ini.

c. Mazhab Maliki

Mazhab ini didirikan oleh Imam Malik. Penganutnya tersebar luas di daerah Afrika Barat dan Utara. Jumlah pengikutnya mencapai 20% muslim.

d. Mazhab Hanbali

Mazhab ini digagas oleh murid Imam Ahmad bin Hanbal. Meskipun hanya dianut oleh 5% muslim dunia, mazhab inilah yang dipegang oleh negara Arab Saudi. Yang menarik, Arab Saudi yang didirikan oleh Klan Saud termasuk dalam negara yang juga berpegang teguh pada sikap eksklusif Wahhabiyah, yang kadang dikaitkan dengan "terorisme Islam".⁷⁵

Kemudian daripada itu, dalam peta politik Islam, Sunni adalah kelompok mayoritas yang selalu memegang supremasi kekuasaan. Pemikiran politik Sunni sering dijadikan sebagai alat legitimasi bagi kekuasaan yang sedang berkembang di dunia Islam. Beberapa tokoh Sunni merumuskan pemikiran politik mereka yang cenderung bersifat akomodatif terhadap kekuasaan dan pro pada status quo. Pandangan mereka yang bersifat khalifah sentris adalah ciri umum paradigma politik Sunni. Kepala negara atau khalifah memegang peranan penting dan memiliki kekuasaan yang sangat luas. Rakyat dituntut untuk mematuhi kepala negara, bahkan di kalangan sebagian pemikir Sunni kadang-kadang sangat berlebihan. Biasanya mereka mencari dasar legitimasi keistimewaan kepala negara atas rakyatnya pada Al-Quran dan Hadis Nabi Saw. Di

⁷⁵ Syarafuddin Al-Musawi, *Dialog Sunnah dan Syi'ah*, terj. Muhammad al-Baqir (Bandung: Mizan, 1983), h. 23.

antaranya yang mereka jadikan landasan adalah surat al-Nisa, 4:59 yang memerintahkan umat Islam untuk patuh kepada Allah, Rasul-Nya dan *ulu al-amr* di antara mereka. Selain itu juga surat al-An`am, 6:165 yang menyatakan bahwa Allah menjadikan manusia sebagai khalifah-Nya di bumi dan melebihkan sebagian atas yang lain.

Keberadaan kelompok Sunni dimulai sejak berakhirnya pemerintahan *al-Khulafa` al-Rasyidun*. Selain dinamakan Sunni, kelompok ini juga dikenal dengan nama *ahl al-hadis wa al-sunnah*, *ahl al-haqq wa al-sunnah* dan *ahl al-haqq wa al-din wa al-jama`ah*.⁷⁶ Secara sederhana dapat dikatakan bahwa paham Sunni adalah paham yang berpegang teguh pada tradisi salah satu mazhab dari mazhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi`i dan Hanbali) dalam bidang fikih; ajaran Abu al-Hasan al-Asy`ari dan Abu Manshur al-Maturidi dalam bidang teologi; ajaran al-Junaid dan al-Ghazali dalam bidang tasawuf⁷⁷ serta ajaran/pemikiran kelompok mayoritas ulama seperti al-Mawardi, al-Ghazali serta Ibn Taimiyah dalam bidang politik (*siyasa*). Istilah Sunni dikenal pemakaiannya dalam konteks politik dan untuk membedakannya dengan kelompok-kelompok politik lain seperti Khawarij dan Syi`ah.

Setelah Nabi Saw. wafat terjadi perdebatan di kalangan umat Islam tentang siapa yang akan menggantikan beliau sebagai pemimpin umat Islam. Sebelum wafat Nabi tidak memilih dan menunjuk tentang siapa penggantinya kelak. Akhirnya, dalam sebuah pertemuan di Saqifah Bani Sa`idah, terpilihlah Abu Bakar sebagai pengganti Nabi. Setelah itu berturut-turut terpilih Umar ibn al-Khattab, Usman ibn Affan dan Ali ibn Abi Thalib sebagai pemimpin umat Islam. Mereka kemudian dikenal sebagai Khulafa al-Rasyidin.

Setelah berakhir masa khalifah yang empat tersebut, naiklah Mu`awiyah yang membangun Dinasti Bani Umayyah. Namun naiknya Mu`awiyah mendapat tantangan dari sebagian umat Islam yang mendukung Ali (Syi`ah) dan kelompok sempalan Khawarij. Akhirnya pada periode awal umat Islam terpecah menjadi tiga kelompok, yaitu mayoritas pendukung Mu`awiyah yang kemudian dikenal dengan jamaah (Sunni),

⁷⁶ Muhammad Amin Suma, "Kelompok dan Gerakan," dalam Taufik Abdullah, ed., *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2002), h. 358; lihat juga Harun Nasution, *Teologi Islam Aliran-aliran Sejarah Analisa Perbandingan*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 64-65.

⁷⁷ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren*, (Jakarta: LP3ES, 1994), h. 149.

pendukung Ali (Syi'ah dan Khawarij. Dalam perkembangan selanjutnya, kelompok Sunnilah yang paling mendominasi peredaran politik Islam.

Sebagai kelompok mayoritas, ciri umum pemikiran politik Sunni ditandai oleh pandangan mereka tentang hubungan yang integral antara agama dan negara, khalifah sentris atau kewajiban taat kepada kepala negara, pengutamaan suku Quraisy sebagai khalifah, penolakan terhadap oposisi dan akomodatif terhadap kekuasaan. Pandangan-pandangan demikian akhirnya melahirkan prinsip lebih mengutamakan keharmonisan dalam politik Islam.

Dalam pandangan tentang hubungan yang integral antara agama dan negara, menurut tokoh Sunni, al-Mawardi, negara dibentuk untuk menggantikan posisi kenabian dalam rangka memelihara agama dan mengatur kehidupan dunia.⁷⁸ Pelembagaan negara merupakan *fardhu kifayah* berdasarkan ijma' ulama. Pandangan al-Mawardi ini didasarkan atas realitas sejarah *al-Khulafa' al-Rasyidun* dan khalifah-khalifah sesudah mereka, baik Bani Umayyah maupun Bani Abbas, yang merupakan lambang kesatuan politik umat Islam. Pandangan al-Mawardi ini juga sejalan dengan kaidah ushul fiqh *ma la yatimmu al-wajib illa bihi fahuwa wajib* (suatu kewajiban tidak sempurna terpenuhi kecuali melalui sarana atau alat, maka sarana atau alat tersebut juga wajib dipenuhi). Artinya, menciptakan dan memelihara kemaslahatan adalah wajib, maka mendirikan negara sebagai sarana menciptakan kemaslahatan tersebut juga wajib.

Pendapat al-Mawardi di atas juga sejalan dengan pemikiran al-Ghazali. Menurut al-Ghazali, manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Di sinilah perlunya mereka hidup bermasyarakat dan bernegara. Namun demikian, lanjut al-Ghazali, pembentukan negara bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan praktis duniawi, melainkan juga untuk persiapan bagi kehidupan akhirat kelak. Berdasarkan pandangan di atas al-Ghazali berpendapat bahwa kewajiban pembentukan negara dan pemilihan kepala negara bukanlah berdasarkan pertimbangan rasio, melainkan berdasarkan kewajiban agama (Syar'i). Hal ini dikarenakan bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan akhirat tidak tercapai tanpa pengamalan dan penghayatan agama secara benar.⁷⁹

⁷⁸ Abu al-Hasan al-Mawardi, *al-Ahkâm al-Sulthâniyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.p.), h. 5.

⁷⁹ Al-Ghazali, *al-Tibr al-Masbûk fi Nâshihat al-Mulûk*, terjemahan Ahmadie Thaha dan Ilyas Ismail, (Bandung: Mizan, 1994), h. 136; lihat juga Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, h. 74-76.

Berbeda dengan dua pemikir Sunni di atas, Ibn Taimiyah berpendapat bahwa mengatur urusan umat memang merupakan kewajiban agama yang terpenting, tetapi hal ini tidak berarti pula bahwa agama tidak dapat hidup tanpa negara.⁸⁰ Ibn Taimiyah menolak landasan *ijma`* sebagai alasan pembentukan negara seperti dalam pandangan al-Mawardi. Ia lebih menggunakan pendekatan sosiologis. Menurut Ibn Taimiyah, kesejahteraan manusia tidak dapat tercapai kecuali hanya dalam satu tatanan sosial di mana setiap orang saling bergantung dan membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Bagi Ibn Taimiyah, penegakan institusi negara bukanlah atas dasar agama, melainkan hanya kebutuhan praktis saja.

Dalam masalah kedua, semua pemikir Sunni yang menjadi objek penelitian ini sepakat tentang pentingnya kepatuhan kepada kepala negara. Mereka menganggap kepala negara sebagai sosok sentral dalam pemerintahan Islam. Otoritasnya tidak boleh digugat dan perintahnya tidak boleh dibantah. Dalam batas-batas tertentu bahkan kepatuhan ini bersifat mutlak.

Al-Mawardi memulai pendapatnya tentang kepatuhan kepada kepala negara dengan proses pemilihan kepala negara. Menurut al-Mawardi, pemilihan kepala negara harus memenuhi unsur *ahl al-ikhtiyar* (orang yang berhak memilih) dan *ahl al-imamah* (orang yang berhak menduduki jabatan kepala negara). Unsur pertama harus memenuhi kualifikasi adil, mengetahui dengan baik kandidat kepala negara serta mempunyai wawasan yang luas dan kebijakan, sehingga dapat mempertimbangkan hal-hal yang terbaik untuk negara. Kemudian, calon kepala negara harus memenuhi tujuh persyaratan, yaitu adil, memiliki ilmu yang memadai untuk berijtihad, sehat panca indranya, punya kemampuan menjalankan perintah agama demi kepentingan rakyat, berani melindungi wilayah kekuasaan Islam, berjuang memerangi musuh serta berasal dari keturunan Quraisy.

Pemilihan kepala negara ini diawali dengan adanya kontrak antara *ahl al-ikhtiyar* dan *ahl al-imamah* ini. Dari kontrak ini lahirlah hak dan kewajiban secara timbal balik antara kepala negara sebagai pemegang amanah dan rakyat sebagai pemberi amanah. Kepala negara wajib menjalankan pemerintahannya dengan baik dan

⁸⁰ Ibn Taimiyah, *Al-Siyāsah al-Syar‘iyah fi Ishlāh al-Râ‘i wa al-Ra‘iyyah*, (Mesir: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1969), h. 161.

sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Sebagai balasannya, kepala negara berhak mendapatkan kepatuhan dari rakyat. Di sisi lain, rakyat yang telah memberikan bai'at mereka atas kepala negara wajib taat kepada kepala negara. Kewajiban taat ini tidak terbatas hanya untuk kepala negara yang baik dan adil, tetapi juga untuk kepala negara yang jahat.

Al-Mawardi melandaskan pandangannya pada surat al-Nisa' ayat 49 yang mewajibkan umat Islam taat kepada Allah, Rasul-Nya dan ulul amri di antara mereka. Selain itu, al-Mawardi juga mengutip hadis Nabi dari Abu Hurairah, "*Kelak akan ada pemimpin-pemimpin kamu sesudahku, baik yang adil maupun yang jahat. Dengarkan dan taatilah mereka sesuai dengan kebenaran. Kalau mereka baik, maka kebaikan itu untuk kamu dan mereka. Jika mereka jahat, maka akibat baiknya untuk kalian dan kejahatannya akan kembali kepada mereka.*"

Ibn Taimiyah mengembangkan konsep *ahl al-syaukah* dalam teori politiknya. Menurut Ibn Taimiyah, *ahl al-syaukah* ini merupakan orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan dan kedudukan yang dihormati dalam masyarakat. *Ahl al-syaukah* inilah yang memilih kepala negara dan melakukan bai'at yang kemudian diikuti oleh rakyat. Seseorang tidak dapat menjadi kepala negara tanpa dukungan dari *ahl al-syaukah*.

Al-Ghazali juga merumuskan syarat-syarat kepala negara secara rinci. Menurutya, kepala negara harus memenuhi kualifikasi dewasa, otak yang sehat, merdeka, laki-laki, keturunan Quraisy, memperoleh hidayah dan ilmu pengetahuan serta wara'. Bagi al-Ghazali, karena kekuasaan kepala negara tidak datang dari rakyat, seperti pendapat al-Mawardi, tetapi dari Tuhan, maka kekuasaan kepala negara adalah suci dan tidak boleh dibantah. Kepala negara menempati posisi sentral dalam negara.⁸¹

Berbeda dengan al-Mawardi dan al-Ghazali yang merumuskan kualifikasi kepala negara secara rinci, Ibn Taimiyah hanya menetapkan syarat kejujuran (*amanah*) dan kewibawaan atau kekuatan (*quwwah*) bagi seorang kandidat kepala negara dan tidak memutlakkan suku Quraisy. Indikasi kejujuran seseorang dapat dilihat dari ketakwaannya kepada Allah, ketidakbersediaannya menjual ayat-ayat Allah demi kekayaan duniawi dan kepentingan politik praktis serta sikap tidak takutnya kepada

⁸¹ Ibn Taimiyah, *Minhaj al-Sunah al-Nabawiyah II* (Riyadh : Maktabah al-Riyadh al-Haditsah, t.t.), h. 209.

manusia selama ia berada dalam kebenaran. Untuk mendukung pendapatnya, Ibn Taimiyah mengutip ayat Al-Quran surat al-Nisa', 4:58, yang memerintahkan umat Islam untuk menyerahkan amanah kepada yang berhak menerimanya.

Sementara syarat *quwwah* memegang peranan penting dalam konsepsi politik Ibn Taimiyah, karena seorang kepala negara adalah pembimbing dan pengayom masyarakat. Tugas dan tanggung jawabnya sangat berat dengan otoritas tertinggi yang diperolehnya dalam masyarakat. Menurutnya, kewajiban kepala negara adalah menegakkan institusi *amar ma 'ruf nahy munkar*, sehingga hal-hal yang dikehendaki Allah dapat terwujud dalam kehidupan umat Islam dan hak-hak individu terjamin dalam masyarakat.

Kelanjutan dari pendapat Ibn Taimiyah ini adalah penekanannya terhadap kepatuhan rakyat pada kepala negara. Memang, sebagaimana halnya al-Mawardi, Ibn Taimiyah memandang figur kepala negara memegang posisi penting dalam negara. Sebagai pemimpin umat Islam, kepala negara harus ditaati, bahkan sekalipun zalim. Menurut Ibn Taimiyah, sebuah masyarakat yang enam puluh tahun dipimpin oleh kepala negara yang zalim lebih baik daripada masyarakat tanpa negara dan pimpinan, meskipun hanya semalam.

Dari pemikiran tentang kekuasaan kepala negara di atas, ketiga ulama Sunni ini merumuskan pemikiran bahwa tidak boleh ada oposisi atau perlawanan terhadap kepala negara. Al-Mawardi menyatakan hadis Nabi, seperti dikutip di atas untuk mendukung pendapatnya bahwa kepala negara bersifat mutlak kekuasaannya. Melakukan oposisi, meskipun al-Mawardi mengembangkan teori kontrak sosial, adalah hal yang dilarang. Hal yang sama juga ditegaskan oleh al-Ghazali. Bagi *Hujjah al-Islam* ini, wajib hukumnya atas rakyat dari tingkat mana pun untuk taat mutlak kepada kepala negara dan melaksanakan perintahnya.

Larangan oposisi dalam pemikiran politik Sunni klasik ini lebih didasarkan pada akibat buruk yang mungkin terjadi dalam masyarakat. Sangat mungkin timbul suasana *chaos* dalam negara bila rakyat melakukan oposisi terhadap kepala negara. Karena itu, bagi mereka, menghindarkan kekacauan yang lebih besar merupakan hal yang perlu diambil. Lebih baik dalam suasana pemerintahan yang despotik, umpamanya, namun masyarakat tidak bergolak, daripada menolak kepemimpinannya sehingga menimbulkan

gejolak dalam masyarakat. Bagi ketiga pemikir Sunni ini, kepala negara adalah bayang-bayang Allah di muka bumi.